



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

2025

LAPORAN TAHUNAN

PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA AMBON

KATA PENGANTAR

Laporan tahunan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, serta perkembangan kegiatan pembangunan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak, terutama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta instansi atau lembaga lain yang membutuhkannya. Selain itu, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sepanjang tahun tersebut.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai kekurangan, begitu pula dengan hasil yang telah dicapai. Namun, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang guna mencapai hasil yang lebih optimal.

Demikian laporan ini disusun. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon serta sejauh mana tugas dan fungsinya telah dijalankan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ambon, 06 April 2026

Kepala Pelabuhan,



Jafar Sahubauwa, S.St.Pi

NIP. 19761210 200212 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun 2025 menyajikan berbagai pencapaian maupun tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tersebut. Capaian ini tercermin dalam perkembangan realisasi anggaran, operasional pelabuhan, implementasi program dan kebijakan, serta akuntabilitas kinerja.

Secara operasional, PPN Ambon mencatat aktivitas pendaratan hasil tangkapan ikan dari kapal penangkap dengan berbagai jenis alat tangkap. Volume produksi ikan yang didaratkan mencapai 3.679 ton, melampaui target produksi sebesar 2.364 ton (156%) dan mengalami peningkatan sebesar 28,59% dibandingkan tahun 2024 (2.627 ton). Pukat cincin pelagis kecil menjadi alat tangkap yang mendominasi tangkapan (26,29% dari total produksi). Berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), produksi terbesar berasal dari WPP 714 (Laut Banda) sebanyak 1.787 ton (48,57%), diikuti oleh WPP 718 (Laut Arafura) sebanyak 1.556 ton (42,30%), dan WPP 715 (Laut Maluku) sebanyak 336 ton (9,13%). Dari segi pemasaran, distribusi hasil tangkapan didominasi oleh tujuan regional sebesar 65,77% yaitu ke Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur, sementara ekspor mencapai 18,08% dengan tujuan Vietnam, Filipina, Thailand berupa tuna loin beku, sedangkan distribusi lokal sebesar 11,01% disalurkan ke pasar tradisional di Ambon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) sebanyak 3 kali dengan menerbitkan 232 sertifikat untuk nakhoda kapal perikanan.

Pelayanan persetujuan berlayar (SPB) selama tahun 2025 mencapai 686 lembar, mengalami kenaikan sebesar 24,9% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 549 lembar. Peningkatan ini sejalan dengan jumlah kapal berukuran di bawah 30 GT yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kapal-kapal yang berukuran di atas 30 GT. Kapal-kapal berukuran di bawah 30 GT memiliki hari operasi yang lebih pendek sehingga berpengaruh pada frekuensi kunjungan dan keberangkatan.

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) merupakan system informasi yang berfungsi untuk mendukung pengembangan pelabuhan perikanan dalam menciptakan kawasan andalan yang strategis, produktif dan cepat tumbuh sebagai sentra produksi dan industri bagi pengembangan ekonomi terpadu. Berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja pada laman Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang diperoleh pada tiap semester I dan II tahun 2025, kinerja PPN Ambon tergolong dalam kategori **"Sangat Baik"**,

Dalam pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK), jumlah yang diterbitkan pada tahun 2025 mencapai 699 lembar, meningkat 18,17% dari 572 lembar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi serta intensitas kunjungan kapal.

Dalam pelayanan Penerbitan Lembar Awal (LA) dan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LT/LTS), jumlah penerbitan Lembar Awal (LA) pada tahun 2025 mencapai 1.450 lembar, mengalami peningkatan signifikan sebesar 58% dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya mencapai 853 lembar. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan tuna (loin) dari nelayan-nelayan pancing tuna (hand line) yang tersebar di kota ambon dan sekitarnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan nelayan terhadap regulasi penangkapan ikan yang legal, berkelanjutan, serta ketertelusuran hasil tangkapan. Selain itu, meningkatnya permintaan pasar ekspor turut mendorong penerbitan ini. Tahun 2024 juga menjadi tahun pertama PPN Ambon menerbitkan Lembar Turunan Sederhana (LTS), sejak bulan Mei dan berlangsung terus hingga Desember 2024. Dalam kurun waktu 8 bulan, PPN Ambon telah menerbitkan 23 dokumen LTS untuk pengiriman ke luar negeri secara langsung.

Dalam aspek pendataan perikanan, PPN Ambon juga mencatat peningkatan dalam pengelolaan Logbook Penangkapan Ikan (LBPI) melalui diimplementasi Aplikasi Logbook Elektronik (SILOPI). Sepanjang tahun 2025, sebanyak 462 logbook diterima dan diverifikasi melalui sistem digital terintegrasi, meningkat 67% dibandingkan tahun 2024 dengan jumlah 310 Logbook. Implementasi ini mendukung upaya transparansi dan akurasi data perikanan serta membantu pemantauan kegiatan perikanan yang lebih efektif.

Dalam aspek Manifest Sampah, guna mendukung salah satu agenda prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maka pengelolaan sampah merupakan salah satu program PPN Ambon dalam mencegah pencemaran lingkungan limbah

khususnya plastik di laut karena memiliki rentang waktu penguraian yang sangat lama. Sepanjang tahun 2025, jumlah sampah yang diterima dari kapal perikanan mencapai 2.353,4 Kg.

Dalam aspek perbekalan, realisasi penyaluran BBM pada tahun 2025 mencapai 4.685 kiloliter, naik sebesar 32,78% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3.149 kiloliter. Penyediaan air bersih mencapai 3.015 kiloliter, dengan penurunan sebesar -4,91% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 3.163 kiloliter. Sementara itu, pasokan es pada tahun 2025 mencapai 3.031 ton, mengalami kenaikan sebesar 25,07% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.271 ton.

Dalam aspek ketenagakerjaan, PPN Ambon juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 11.079 tenaga kerja (turun 1,98% dibanding 2024 sebesar 14.591 tenaga kerja) terserap dalam berbagai sektor di lingkungan pelabuhan, termasuk operasional pelabuhan, pengolahan hasil tangkapan, distribusi ikan, serta jasa pendukung lainnya. Sekalipun menunjukkan pengurangan dari jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya namun penyerapan tenaga kerja ini menunjukkan peran strategis PPN Ambon dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

PPN Ambon juga mencatat pencapaian dalam penerapan prinsip Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, Kelestarian, dan Kebersihan (K5) melalui aplikasi SELARASKAN KKP. Sepanjang tahun 2025, PPN Ambon mencapai skor implementasi K5 sebesar 83,85% dengan kategori "*Sangat Baik*", yang mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan keselamatan kerja, optimalisasi keamanan pelabuhan, pemeliharaan ketertiban operasional, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kebersihan di area pelabuhan. Pencapaian ini juga didukung oleh peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung serta edukasi bagi tenaga kerja dan pengguna jasa pelabuhan.

Dalam aspek penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Ambon memiliki lahan industri seluas 35.308 m² yang dapat dimanfaatkan dengan skema penggunaan **cara sewa** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pada tahun 2025, realisasi pemanfaatan lahan industri mencapai 99,32% dari total luas lahan.

Dalam aspek keuangan, realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 96,12% dengan nilai Rp12,25 miliar dari total pagu Rp12,74 miliar. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp3,3 miliar atau 234,99% dari target yang ditetapkan. Namun, PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA) pasca produksi belum mencapai target, dengan realisasi sebesar Rp3,13 miliar atau 78,23% dari target Rp4,00 miliar. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh jumlah kunjungan kapal yang beroperasi dengan skema pasca produksi serta volume ikan yang didaratkan di PPN Ambon.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, PPN Ambon berhasil memperoleh nilai evaluasi kinerja dalam kategori "*Istimewa*" berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Keberadaan PPN Ambon diharapkan terus memberikan manfaat bagi sektor perikanan dan masyarakat sekitar dengan meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat tata kelola perikanan tangkap, serta mendukung pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Letak Strategis Dan Geografis PPN Ambon	3
1.3 Potensi Perikanan Maluku.....	4
BAB II ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN.....	7
2.1 Landasan Hukum.....	7
2.2 Tataan, Kedudukan Dan Fungsi.....	9
2.3 Struktur Organisasi	11
2.4 Jumlah Dan Komposisi Pegawai	12
2.4.1 Komposisi Pegawai	12
2.4.2 Kenaikan Pangkat Dan Jenjang.....	13
2.4.3 Kenaikan Gaji Berkala.....	13
2.4.4 Cuti Pegawai	13
2.4.5 Perjalanan Dinas	14
2.4.6 Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	14
2.5 Hubungan Kelembagaan / Lintas Sektor.....	15
2.5.1 Forum Konsultasi	16
2.5.2 Penerapan Koordinasi Pelayanan/Kegiatan/Program	16
2.6 Kegiatan Persuratan	17
BAB III PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN	18
3.1 Organisasi Pengolahan Anggaran	18
3.2 Lokasi Anggaran.....	18
3.3 Realisasi Anggaran	20
BAB IV PERENCANAAN KINERJA	22
4.1 Rencana Strategis	22
4.2 Arah Kebijakan Dan Sasaran Kegiatan PPN Ambon.....	26
4.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
4.3 Target Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	29
BAB V AKUNTABILITAS KINERJA	32
5.1 Akuntabilitas Kinerja	32
5.2 Akuntabilitas Keuangan.....	35
BAB VI KERAGAAN OPERASIONAL PELABUHAN	38
6.1 Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan	38
6.2 Pemasaran Dan Distribusi Hasil Tangkapan	42
6.3 Pembinaan Dan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB)	44
6.4 Pelaksanaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	45
6.5 Penangkapan Ikan Terukur Mendukung PNBP SDA Pasca Produksi ...	48
6.6. Kesyahbandaran.....	50
6.6.1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (PB)	51
6.6.2. Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Keberangkatan Kapal (STBLKK)	55
6.6.3 Manifest Sampah	56

6.6.4 Logbook Penangkapan Ikan (LBPI)	57
6.6.5. Lembar Awal (LA)	59
6.7 Pelayanan Perbekalan	60
6.6.1 Perbekalan Es	60
6.6.2 Penyaluran BBM	62
6.6.3 Penyaluran Air Bersih	63
6.8 Sarana Dan Prasarana Pelabuhan	65
6.9 Penggunaan Lahan Dan Fasilitas Pelabuhan	69
6.10 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA.....	72
6.11 Penyerapan Tenaga Kerja.....	75
6.12 Kegiatan K-5	77
BAB VII PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	81
7.1 Program Pengolahan Perikanan Tangkap (Kegiatan Non Fisik)	81
7.1.1 Program Pengembangan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas	81
7.1.1.1 Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat Dan Tidak Bertingkat	82
7.1.1.2 Pemeliharaan Taman Halaman Dan Rumah Negara	83
7.1.2 Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Dan Mesin	84
7.1.2.1 Pemeliharaan Instalasi Listrik	84
7.1.2.2 Pemeliharaan Instalasi Air	84
7.1.2.3 Pemeliharaan Forklift	85
7.2 Program Pengolahan Perikanan Tangkap (Kegiatan Non Fisik)	88
7.2.1 Pengadaan Peralatan Dan Mesin	88
7.2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas	88
7.3 Program Pengolaan PerikananTangkap (Kegiatan Non Fisik)	90
7.3.1 Perbaikan Mesin Kapal Perikanan, Perakitan Alat Tangkap, Dan Penggunaan GPS/Fish Finder	90
7.3.2 Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan	92
7.4 Kaleidoskop 2025	94
BAB VIII PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	108
8.1 Tim Kerja Operasional Pelabuhan	108
8.2 Tim Kerja Dan Tata Kelola Pelayanan Usaha.....	109
8.3 Tim Kerja Kesyahbandaran	110
8.4 Dukungan Manajerial.....	110
BAB IX PENUTUP.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kenaikan Pangkat Periode Tahun 2025.....	13
Tabel 2. Tingkat Golongan Pegawai PPN Ambon Tahun 2025	13
Tabel 3. Rekapitulasi Surat Masuk Dan Keluar Tahun 2025.....	17
Tabel 4. Besaran Pagu Anggaran PPN Ambon Tahun 2025 (S.D 31 Desember 2025)...	20
Tabel 5. Realisasi Dan Sisa Anggaran PPN Ambon TA. 2025	20
Tabel 6. Realisasi Penggunaan PNPB TA. 2025	21
Tabel 7. Indikator Dan Target Kinerja PPN Ambon Tahun 2025.....	30
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	33
Tabel 9. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Tahun 2025	35
Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2025.....	36
Tabel 11. Perbandingan Produksi Dari Nilai Produksi Ikan Tahun 2024 – 2025	41
Tabel 12. Distribusi Dan Pemasaran Volume Perikanan Tangkap Tahun 2025.....	43
Tabel 13. Distribusi Ikan Berdasarkan Wilayah Pemasaran Periode Tahun 2020 – 2025	43
Tabel 14. Tingkat Operasional Pelabuhan Berdasarkan Evaluasi Kinerja PIPP	47
Tabel 15. Realisasi PNPB SDA Di PPN Ambon Tahun 2025	48
Tabel 16. Rincian Realisasi PNPB SDA Di PPN Ambon Perbulan Tahun 2025	49
Tabel 17. Penempatan syahbandar di PPN Ambon & pelabuhan binaan	
Tabel 18. Penerbitan PB Berdasarkan Jenis Kapal Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025	53
Tabel 19. Penerbitan PB Berdasarkan Alat Penangkapan Ikan Dan Ukuran Kapal Tahun 2025	54
Tabel 20. Jumlah Kapal Aktif Dan Berpangkalan Di PPN Ambon Tahun 2025	54
Tabel 21. Rekapitulasi Penerbitan STBLKK Masuk Dan Kunjungan Kapal Berdasarkan API	56
Tabel 22. Jumlah Logbook Yang Diterima Tahun 2025	59
Tabel 23. Jumlah Lembar Awal (LA) SHTI Yang Diterbitkan	60
Tabel 24. Volume Penyaluran Es Tahun 2025	61
Tabel 25. Volume Penyaluran BBM Tahun 2025	62
Tabel 26. Volume Penyaluran Air Bersih Ke Kapal Tahun 2025	64
Tabel 27. Fasilitas Pokok Di PPN Ambon	66
Tabel 28. Fasilitas Fungsional Di PPN Ambon	67
Tabel 29. Fasilitas Penunjang Di PPN Ambon.....	69
Tabel 30. Penggunaan Lahan PPN Ambon Tahun 2025	69
Tabel 31. Investasi Di Kawasan PPN Ambon	70
Tabel 32. Peredaran Uang Di PPN Ambon Tahun 2025.....	72
Tabel 33. Peredaran Uang Di PPN Ambon Tahun 2021 – 2025.....	72
Tabel 34. Hasil Pungutan PNPB Tahun 2025	73
Tabel 35. Realisasi PNPB Per Bulan Tahun 2025	75
Tabel 36. Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2025	75
Tabel 37. Penyerapan Tenaga Kerja Periode Tahun 2022 – 2025	76
Tabel 38. Data Pengumpulan Sampah Dari Kapal	78
Tabel 39. Hasil Penilaian Selaraskan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi PPN Ambon	3
Gambar 2. Peta Wilayah Pengembangan (Gugus Pulau) Provinsi Maluku	5
Gambar 3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PPN Ambon	11
Gambar 4. Dashboard kinerja tahun 2025	32
Gambar 5. Aktifitas Pendaratan Hasil Tangkapan	38
Gambar 6. Grafik Volume Produksi Berdasarkan Alat Panangkapan Ikan	39
Gambar 7. Grafik Volume Produksi Menurut Kelompok Ikan Dan WPP	40
Gambar 8. Grafik Volume Dan Nilai Produksi Tahun 2021 – 2025	42
Gambar 9. Grafik Distribusi Ikan Berdasarkan Wilayah Pemasaran Tahun 2021 – 2025	44
Gambar 10. Alur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	52
Gambar 11. Alur Pelayanan Penerbitan STBLKK Masuk	55
Gambar 12. Penyerahan Dan Pengambilan Kantong Plastik Di Kapal Perikanan	57
Gambar 13. Tampilan Aplikasi Sistem Logbook Penangkapan Ikan (SILOPI)	58
Gambar 14. Grafik Penyaluran Es Di PPN Ambon Tahun 2021 – 2025	61
Gambar 15. Grafik Penyaluran BBM Di PPN Ambon Tahun 2021 – 2025	63
Gambar 16. Grafik Penyaluran Air Bersih Di PPN Ambon Tahun 2021 – 2025	64
Gambar 17. Gedung Perkantoran Administrasi Dan Dermaga Di PPN Ambon	68
Gambar 18. Balai Pertemuan Nelayan Dan Pos Jaga Keamanan	68
Gambar 19. Pelaksanaan Kegiatan K-5 Di PPN Ambon	77
Gambar 20. Penyerahan Plastik Sampah Kepada Nelayan	78
Gambar 21. Dashboard SELARASKAN KKP	79
Gambar 22. Dokumentasi Pemeliharaan Gedung Bertingkat	82
Gambar 23. Dokumentasi Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	83
Gambar 24. Pemeliharaan taman dan halaman	83
Gambar 25. Pemeliharaan rumah negara	84
Gambar 26. Pemeliharaan Listrik	84
Gambar 27. Perbaikan Pipa Instalasi Air	85
Gambar 28. Pemeliharaan Forklift	85
Gambar 29. Pengadaan LED TV SMART	86
Gambar 30. Pengadaan PC	86
Gambar 31. Pengadaan Laptop	86
Gambar 32. Pengadaan runing teks display	87
Gambar 33. Pengadaan Teropong	87
Gambar 34. Pengadaan TV SMART	87
Gambar 35. Pengadaan AC Split 2 Pk	87
Gambar 36. Pengadaan AC Split 1 Pk	88
Gambar 37. Pengadaan Mesin Pompa Air	88
Gambar 38. Pengadaan Peralatan Selam Scuba Diving	88
Gambar 39. Pengadaan Peralatan Podcast	88
Gambar 40. Pengadaan Mini PC	88
Gambar 41. Timbangan Ikan 100 Kg	88
Gambar 42. Pengadaan mobil dinas	88
Gambar 43. Pengadaan Motor Roda 3	89
Gambar 44. Pemberian materi dan praktek lapangan peserta pelatihan	92
Gambar 45. Kegiatan Bimbingan Teknisi Kecakapan Nelayan	93

PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau (FAO, 2023) dan wilayah perairan seluas 6,8 juta km², serta garis pantai sepanjang 108.000 km membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar dan melimpah (Anugrah & Alfarizi, 2021). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa potensi lestari sumber daya ikan di Indonesia mencapai 12.011.125 ton per tahun. Potensi tersebut mencakup beberapa jenis perikanan laut, antara lain ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, biota bintang lunak, serta krustasea lainnya. Potensi lestari sumber daya ikan ini tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia (Komnaskajiskan, 2023).

Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan arah dan kebijakan strategis periode 2025-2029 yang berfokus pada transformasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kebijakan ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025-2029, dengan menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi biru (blue economy).

Pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif serta memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP. Penyusunan rencana strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dapat direviu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan pelaksanaan arah dan kebijakan tersebut, KKP telah menetapkan lima program prioritas ekonomi biru, yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;

4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu, yang digunakan sebagai lokasi kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan. Pelabuhan ini berfungsi sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau melakukan bongkar muat ikan, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang kegiatan perikanan. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan memiliki peranan strategis dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibangun oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) serta mendukung operasional kapal-kapal perikanan. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1997 dengan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) hingga peningkatan status menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara pada tahun 2000, PPN Ambon telah berperan aktif dalam mendukung pembangunan sektor perikanan di Maluku, khususnya di bidang perikanan tangkap.

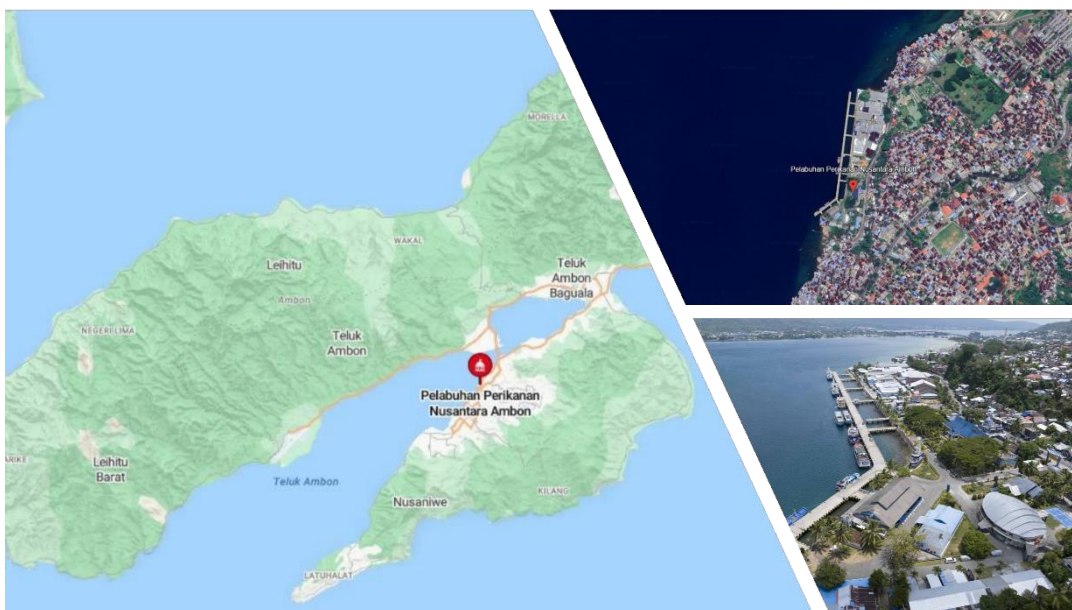
Dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya, PPN Ambon mendukung berbagai aktivitas penangkapan ikan, mulai dari tambat labuh, bongkar muat, penyediaan logistik, pembinaan nelayan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, hingga mendorong pertumbuhan industri perikanan melalui kawasan industri perikanan yang tersedia.

Dalam rangka menciptakan keterpaduan dan keharmonisan pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, PPN Ambon sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan berbasis Ekonomi Biru dalam pembangunan nasional. Ekonomi Biru dalam pembangunan nasional berfokus pada pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap, yang memiliki sistem dinamis, kompleks, dan multidimensional. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selain itu, PPN Ambon juga mendukung serta melaksanakan berbagai agenda dan program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, yaitu Kebijakan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) berbasis kuota, di mana PPN Ambon termasuk dalam Zona Penangkapan 03. Program prioritas DJPT ini merupakan terobosan nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan di sektor perikanan tangkap, dengan tujuan meningkatkan produksi, produktivitas, serta tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, sehingga sektor perikanan tangkap dapat berkembang secara berkelanjutan demi kesejahteraan nelayan.

1.2. Letak Strategis dan Geografis PPN Ambon

Secara geografis, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon terletak di perairan Teluk Ambon, tepatnya pada koordinat $128^{\circ}11'20,36''$ BT - $03^{\circ}40'32,05''$ LS, berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Pandan Kasturi, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta Lokasi PPN Ambon

Provinsi Maluku berada pada Zona 03 berdasarkan pembagian zona dalam program Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang termasuk dalam Zona 03 meliputi WPP NRI 714 (Laut Banda), WPP NRI 715 (Laut

Seram), dan WPP NRI 718 (Laut Aru dan Laut Arafura). Dengan letak geografisnya yang strategis, PPN Ambon menjadi *home base* bagi kapal-kapal perikanan yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2015 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, yang mencakup wilayah sebagai berikut :

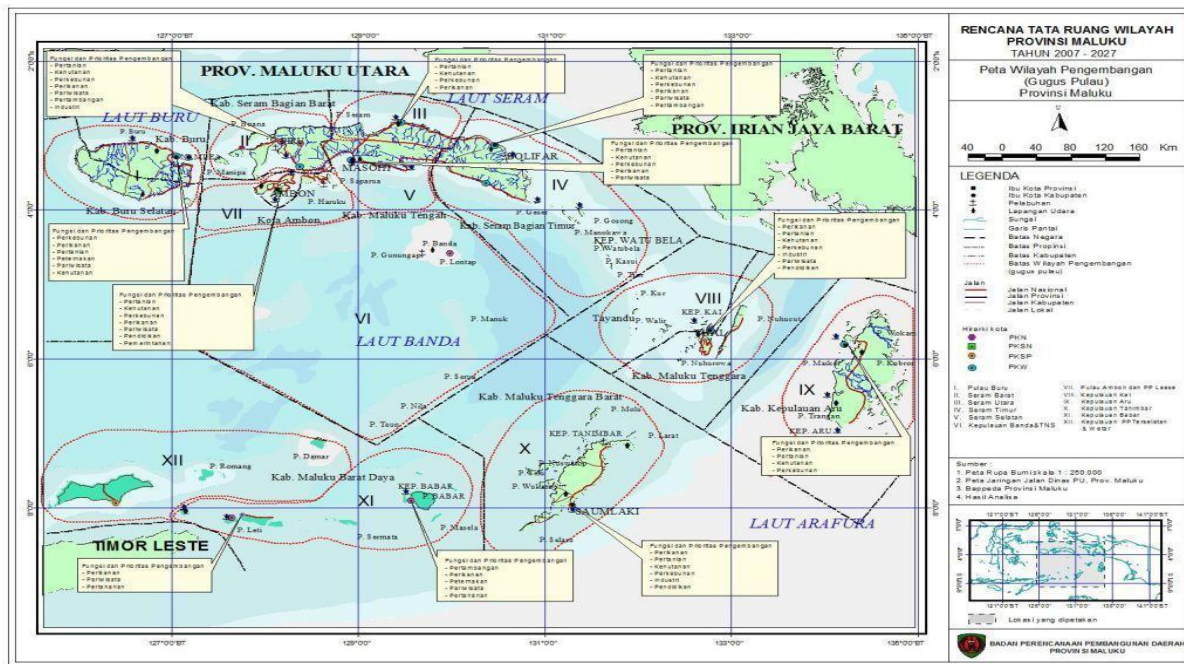
- a. Wilayah kerja, yang terdiri dari :
 - Wilayah kerja daratan seluas 5,3 Ha (lima koma tiga hektar) dan;
 - Wilayah kerja perairan seluas 48,60 Ha (empat puluh delapan koma enam puluh hektar).
- b. Wilayah Pengoperasian, yang terdiri dari :
 - Wilayah pengoperasian daratan seluas 29,848 Ha (dua puluh sembilan koma delapan ratus empat puluh delapan hektar) dan;
 - Wilayah pengoperasian perairan seluas 155,22 Ha (seratus lima puluh lima koma dua puluh dua hektar).

1.3. Potensi Perikanan Maluku

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan mengusung pendekatan pembangunan wilayah berbasis konsep Laut Pulau dan Gugus Pulau. Konsep Laut Pulau memberikan justifikasi terhadap orientasi pembangunan dan pengembangan konektivitas melalui jaringan yang bersifat holistik, dengan memanfaatkan jejaring ekonomi dan ekologi ke arah Utara, Timur, dan Selatan. Dalam perkembangannya, jaringan konektivitas ke arah Barat juga menjadi kebutuhan penting.

Sementara itu, konsep Gugus Pulau (GP) bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitarnya dalam cakupan yang lebih luas. Batasan GP tidak didasarkan pada batas administrasi pemerintahan seperti kecamatan atau kabupaten/kota di Provinsi Maluku, melainkan lebih pada sektor atau komoditas unggulan yang dapat menciptakan skala ekonomi yang efisien, efektif, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (Renstra DKP) Provinsi Maluku Tahun 2019–2024, Provinsi Maluku dibagi menjadi 12 Gugus Pulau, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Gambar 2. Peta Wilayah Pengembangan (Gugus Pulau) Provinsi Maluku

Secara astronomis, Provinsi Maluku terletak antara 2°03' – 9° Lintang Selatan dan 124° – 136° Bujur Timur. Provinsi Maluku merupakan gugusan kepulauan yang berada di bagian timur wilayah Indonesia. Secara geografis, batas wilayah Provinsi Maluku meliputi :

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara dan Laut Seram;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut Timor dan Australia;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Laut Banda;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Provinsi Papua dan Laut Arafura.

Provinsi Maluku dikenal sebagai Provinsi Seribu Pulau dengan luas wilayah administratif sebesar 712.479,65 km², yang terdiri atas perairan seluas 658.294,69 km² (92,4%) dan daratan seluas 54.185 km². Secara geografis, Maluku terletak di pusat sabuk Segitiga Terumbu Karang Dunia (*Coral Triangle*), menjadikannya daerah yang kaya akan sumber daya ikan. Provinsi ini memiliki 1.340 pulau, yang terdiri atas 1.336 pulau kecil dan 4 pulau besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, potensi sumber daya perikanan diatur per kelompok jenis ikan dan per wilayah pengelolaan perikanan, adapun kelompok jenis ikan tersebut antara lain ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan dan cumi, dimana diperoleh rata-rata untuk

estimasi potensi dari 9 kelompok jenis ikan untuk ke-3 WPP tersebut diperkirakan mencapai 487.426 ton dan untuk Provinsi Maluku diperoleh data capaian potensi perikanan tangkap yang dilaporkan di tahun 2024 sebesar 399.143 Ton (sumber: <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/ntn/tbl-statis>). Sumberdaya perikanan tersebut tersebar di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), yaitu:

- WPP-NRI 714: Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
- WPP-NRI 715: Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
- WPP-NRI 718: Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan bagian timur Laut Timor.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlokasi di Provinsi Maluku. PPN Ambon bertugas melaksanakan fungsi kepelabuhanan perikanan serta melakukan pembinaan operasional pelabuhan perikanan.

Berdasarkan laporan statistik perikanan tangkap tahun 2025, produksi perikanan di PPN Ambon tercatat sebesar 3.679 ton, dengan nilai produksi mencapai Rp 101.808.124.100. Hasil produksi perikanan tersebut didistribusikan ke berbagai daerah di Provinsi Maluku, terutama ke pasar lokal di Kota Ambon serta beberapa kabupaten lainnya. Selain itu, hasil tangkapan juga dipasarkan pada skala domestik maupun ekspor. Dampak positif dari hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di PPN Ambon turut berkontribusi terhadap capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Maluku. Per Desember 2025, berdasarkan data statistik NTN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai NTN di Maluku mencapai 111,66 (sumber: <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/ntn/tbl-statis>). Nilai NTN yang melebihi 100 mengindikasikan bahwa indeks harga yang diterima oleh nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kebutuhan atau pengeluaran mereka, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan nelayan di daerah tersebut.

ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN



BAB II. ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN

2.1. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon adalah :

1. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2021 tentang *logbook* Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/KEPMEN-KP/2015 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Klaster Pelabuhan Perikanan untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan;
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

25. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
27. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
28. Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor B.74/PPN.A/TU.210/I/2025 tentang Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2024.

2.2. Tatanan, Kedudukan dan Fungsi

Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisien dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Adapun tatanan kepelabuhanan perikanan nasional memuat tentang : 1) fungsi pelabuhan perikanan; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) klasifikasi pelabuhan perikanan; dan 4) rencana induk pelabuhan perikanan nasional. Pelabuhan perikanan menyelenggarakan 2 (dua) fungsi utama guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran produknya, yang terbagi atas fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha.

a. Fungsi Pemerintahan,

Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, keamanan

dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan serta pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yang meliputi :

- pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- pelaksanaan kesyahbandaran;
- tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- pemantauan wilayah pesisir;
- pengendalian lingkungan;
- kepabeanan; dan/atau
- keimigrasian.

b. Fungsi Pengusahaan

Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan, yang meliputi :

- pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- pelayanan bongkar muat ikan;
- pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- pemasaran dan distribusi ikan;
- pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- wisata bahari; dan/atau
- penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. Struktur Organisasi

Sejak bulan Januari 2025, Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor: B.74/PPN.A/TU.210/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut : (Gambar 4)



Gambar 3. Struktur organisasi dan tata kerja PPN Ambon

Struktur organisasi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang berdasarkan 23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, dimana susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri atas :

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara;
2. Kepala Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Pelaksana;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4. Jumlah dan Komposisi Pegawai

2.4.1. Komposisi Pegawai

Pada tahun 2025 komposisi jumlah Pegawai PPN Ambon adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, terdiri dari 55 (lima puluh lima) orang ASN dan 15 (lima belas) PPNN. Terdapat proses mutasi kedalam maupun keluar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Pegawai yang melakukan mutasi ke dalam PPN Ambon melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 426/MEN-SJ/KP.431/X/2025 terdapat 2 orang PNS atas nama **Jemmy P Sangadji, S.Pi** dan **Lartha Apla Unawekla**.

Perubahan komposisi pegawai terjadi di tahun 2025, terdapat PNS yang mengalami mutasi keluar dari PPN Ambon terdapat 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu atas nama **James Kaluntas, S.T, Nurul Chanifah, S.Pi. M.Si**, dan **Ricardo A. Siringoringo, S.Pi, M.Si**.

Pada 1 Juni 2026 terdapat penambahan Pegawai melalui proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 3 orang, hal ini merupakan hasil dari seleksi serentak nasional.

Terjadi perubahan komposisi pegawai pada tahun 2025, tepat di 1 Oktober 2025 terdapat perubahan status 15 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNN) dan 1 Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan total 16 PPPK.

Terjadi penambahan komposisi pegawai lagi sejumlah 1 pegawai, yang semula Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Hingga akhir Desember 2025 komposisi pegawai berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang PNS, 3 (tiga) orang CPNS, 34 (tiga puluh empat) orang PPPK dan 1 (satu) orang PPPK Paruh Waktu. Jumlah ASN yang ada sekarang ini sebenarnya cukup memadai, akan tetapi kualitas SDM-nya dianggap belum memadai dan masih diperlukan penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai kebutuhan agar organisasi berjalan efektif dan optimal. Untuk itu pada tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon masih merekrut ditempatkan pada berbagai seksi/bagian dengan jabatan pramubakti, pengemudi, dan petugas kebersihan

2.4.2. Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pada tahun 2025, sebanyak 4 (tujuh) orang ASN memperoleh kenaikan pangkat pada periode bulan April 2025 sejumlah 4 (empat) orang memperoleh kenaikan pangkat pilihan.

Tabel 1. Kenaikan pangkat periode Tahun 2025

No	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat, Gol, Ruang		Jenis KP	No. SK
			Sebelum	Sesudah		
Periode April 2025						
1	Dahlan Souliisa, S.Pi NIP. 19690501 200212 1 003	Analisis Kesyahbandaran	Penata, III/c	Penata Tk I, III/d	Pilihan	04/MEN-SJ/KP.420/III/2025
2	Hardin Susanto NIP. 19741023 200502 1 001	Pengelola Monitoring Evaluasi	Penata Muda, III/a	Penata Muda Tk I, III/b	Pilihan	11/MEN-SJ/KP.420/III/2025
3	Junus Nanlohy NIP. 19680128 200811 1 001	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Pengatur, II/c	Pengatur Tk. I II/d	Pilihan	26/MEN-SJ/KP.420/III/2025
4	Resmi, S.Pi NIP. 19730502 200604 1 005	Pengelola Data	Penata, III/c		Pilihan	496/MEN-SJ/KP.420/III/2025

Setelah mengalami kenaikan pangkat pada periode April Tahun 2025, berikut ini hasil rekapitulasi tingkat golongan pegawai di lingkup PPN Ambon tahun 2025:

Tabel 2. Tingkat golongan pegawai PPN Ambon Tahun 2025

No.	Bagian/Seksi	Tingkat Golongan															TOTAL
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				PPPK			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	IX	VII	V	
1	Kepala Pelabuhan		1														1
2	Sub Bagian Umum					2	5	1				1	3	6		1	19
3	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha					2			1		1	1	1	5	2	6	19
4	Tim Kerja Kelompok Operasional Pelabuhan	1				1	3	1	1				2	6	1	1	17
5	Tim Kerja Kelompok Kesyahbandaran	1				5	3	2					1	3		3	18
Jumlah		2	1	0	0	10	11	4	2	0	1	2	7	20	3	11	74

2.4.3. Kenaikan Gaji Berkala

Pada tahun 2025, sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ASN memperoleh kenaikan gaji berkala (KGB).

2.4.4. Cuti Pegawai

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pemberian cuti diatur dalam PP 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi PNS. Lamanya cuti tahunan pada tahun 2022 adalah 12 (dua belas) hari kerja dengan minimal pengambilan cuti selama 1 (satu) hari kerja. Adapun pegawai yang mengambil cuti selama tahun 2025 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang ASN.

2.4.5. Perjalanan Dinas

Selama tahun 2025 PPN Ambon juga mengikutsertakan pegawainya pada berbagai pendidikan, pelatihan, rapat koordinasi serta sosialisasi yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan baik pusat maupun daerah. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai PPN Ambon.

2.4.6. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Untuk membina dan meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, maka secara rutin dilakukan Apel Pagi (menjelang masuk kantor) tepat pukul 07.30 WIT dan Apel Sore (menjelang pulang) tepat pukul 16.00 WIT (Senin – Kamis), 16.30 WIT (Jum'at). Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/81/M.KT.00/2021 perihal Himbauan Pelaksaaan Apel Pagi tanggal 14 Juni 2021, pelaksanaan Apel pagi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon mengacu kepada 3 (tiga) aspek penting:

- a. Melaksanakan Apel pada hari Senin-Jumat di pagi dan sore setiap hari;
- b. Mendengarkan lagu Indonesia Raya pada jam 10.00 WIT.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negawai , Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon memberlakukan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu hari Senin s/d Jumat. Jam kerja instansi pemerintah dan Jam kerja pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. Jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui diklat dan bimbingan teknis baik daring maupun luring. Hal ini diwajibkan agar kompetensi pegawai mampu ditingkatkan sesuai dengan target IP ASN yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Pada tahun 2025, sejumlah 57 ASN telah mengikuti diklat baik melalui daring atau luring. Saat ini, diklat dapat melalui secara luring mendatangi setiap pertemuan diklat atau dapat dilakukan secara daring melalui *zoom meeting* atau melalui aplikasi *e-milea* Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.5. Hubungan Kelembagaan / Lintas Sektor

Dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, terdapat hubungan kelembagaan antara berbagai instansi terkait atau lintas sektor yang berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan. Hubungan ini melibatkan interaksi dan koordinasi antara berbagai pihak, baik instansi pemerintah pusat, daerah, serta pihak swasta dan masyarakat nelayan. Masing-masing instansi/pihak terkait berperan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012 Bab X Pasal 31, instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan terdiri dari:

- a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. TNI/POLRI;
- c. Imigrasi;
- d. Bea dan Cukai;
- e. Kesehatan Pelabuhan;
- f. Perhubungan Laut;
- g. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- i. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- j. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- k. Karantina Ikan;
- l. BUMN dan/atau BUMD; dan/atau
- m. Instansi terkait lainnya.

Hubungan kelembagaan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara semua pihak. Beberapa mekanisme koordinasi yang sudah berjalan sepanjang tahun 2025 yaitu:

1. **MoU (*Memorandum of Understanding*)**

Telah dilakukan penandatanganan MoU antara PPN Ambon dan SMK Al-Wathan Ambon dengan MoU Nomor B.27.042/MoU/SMK-AW/XI/2025 tanggal 20 November 2025 tentang perjanjian kerjasama program sistem ganda dan praktek kerja industri.

2. **Pelayanan Terpadu**

Instansi terkait yang melakukan pelayanan terpadu di ruang pelayanan PPN Ambon, yaitu:

- a. Stasiun Pengawasan dan Sumber Daya Ikan Kelautan dan Perikanan Ambon

- b. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon

2.5.1. Forum Konsultasi

Konsultasi membahas sinergi lintas sektor dalam penguatan pelayanan menuju Obvitnas dengan dihadiri oleh PPN Ambon, PSDKP Ambon, Kesyahbandaran PPN Ambon, serta Kabid PRL DKP Provinsi Maluku.

2.5.2. Penerapan koordinasi pelayanan/kegiatan/program

Melibatkan interaksi dan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon
- d. BP2MHKP Ambon
- e. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ambon
- f. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon
- g. Stasiun Meteorologi Kelas IV Maritim Ambon
- h. Polairud Polda Maluku
- i. Lantamal IX Ambon
- j. Bakamla Ambon
- k. Basarnas Ambon
- l. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan cabang Ambon
- m. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku
- n. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon
- o. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon
- p. Lembaga pendidikan (Universitas Pattimura, Universitas Darussalam, Politeknik Perikanan Tual, dan SMA/SMK se wilayah Maluku)
- q. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon
- r. AP2HI (Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia), Yayasan MDPI (Masyarakat & Perikanan Indonesia), Yayasan IPNLF (International Pole and Line Foundation), Indonesia *Global Environment Facility* (GEF) – 6.
- s. LPP WPP-NRI 714 dan 718
- t. Stakeholder LPP WPP-NRI 715
- u. Perbankan (Bank BTN cabang Ambon, Bank Mandiri cabang Ambon)
- v. PT. Pertamina cabang Ambon
- w. UPTD Pelabuhan Perikanan (PP. Sorong, PP. Fandoi, PP. Sanggeng, PP. Klademak, PP. Masohi) PP Ukurlaran dan PPN Merauke.

2.6. Kegiatan Persuratan

Kegiatan pengelolaan persuratan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon telah menggunakan Aplikasi Portal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Disposisi dan Arsip atau biasa disebut juga Portal KKP. Aplikasi Portal KKP ini merupakan salah satu subsistem dari perkantoran elektronik di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis pada jaringan komputer dan aplikasi yang berbasis pada website yang dapat memproses data persuratan dan disposisi dalam program manajemen basis data dan akan terintegrasi dengan aplikasi *mobile*.

Selama tahun 2025 di PPN Ambon terdapat sebanyak 1671 surat masuk, baik melalui surat masuk *online* melalui aplikasi *Portal KKP* maupun *offline* (seperti undangan rapat, surat pemberitahuan kedatangan dan/atau keberangkatan kapal). Sedangkan surat keluar sebanyak 1783. Surat masuk dan keluar terbanyak ada pada bulan Oktober 2025 dan terendah pada bulan Maret 2025. Adapun jumlah surat masuk dan surat keluar di PPN Ambon tahun 2025 tertera pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Rekapitulasi surat masuk dan keluar Tahun 2025

DATA SURAT MASUK/KELUAR PPN AMBON TAHUN 2025			
NO.	BULAN	JUMLAH SURAT	
		MASUK	KELUAR
1	2	3	4
1.	Januari	156	162
2.	Februari	111	98
3.	Maret	90	106
4.	April	114	103
5.	Mei	137	148
6.	Juni	160	131
7.	Juli	151	143
8.	Agustus	116	149
9.	September	170	178
10.	Oktober	238	221
11.	November	130	173
12.	Desember	98	171
TOTAL		1671	1783

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025



BAB III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN

3.1. Organisasi Pengelola Anggaran

Organisasi pengelola anggaran PPN Ambon tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
N a m a : Jafar Sahubauwa, S.St.Pi
N I P : 19761210 200212 1 002
- b. Pejabat Pembuat Komitmen
N a m a : Nurul Chanifah, S.Pi
N I P : 19720920 200112 2 001
- c. Bendaharawan Pengeluaran
N a m a : Wa Supiati, A.Md
N I P : 198704182009122001
- d. Bendaharawan Penerimaan
N a m a : Husna Papalia, A.Md
N I P : 198702172010122002
- e. Pejabat Penandatangan SPM
N a m a : Moh Nurcahyadi, S.Pi
N I P : 198707102015031002
- f. Staf Pengelola Keuangan
- g. Para Pelaksana Kegiatan

Para pengelola anggaran sebagaimana tersebut di atas telah diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2025.

3.2. Alokasi Anggaran

Anggaran Pelabuan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2025 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 032.03.2.622461/2025 tanggal 2 Desember 2024 yang bersumber dari APBN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada awal tahun anggaran adalah sebesar Rp12.590.704.000,- dengan perincian yaitu pagu Rupiah Murni sebesar Rp11.619.652.000,- serta pagu PNBPN sebesar Rp971.052.000,-. Terdapat pagu blokir yang tercantum pada halaman IV DIPA sebesar Rp1.056.897.000,-.

Selama tahun 2025 telah dilakukan 11 kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi ke-1, tanggal 8 Januari 2025, revisi kewenangan KPA yaitu revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
2. Revisi ke-2, tanggal 24 Februari 2025, revisi kewenangan DJA berupa pencatuman Blokir pada Hal IV DIPA yaitu pagu alokasi automatic adjustment sebesar Rp2.409.504.000,-;
3. Revisi ke-3, tanggal 3 Maret 2025, revisi kewenangan Kanwil DJPb Maluku yaitu Perubahan Halaman III DIPA, revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
4. Revisi ke-4, tanggal 14 April 2025, revisi kewenangan DJA berupa Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir);
5. Revisi ke-5, tanggal 24 April 2025, revisi kewenangan Kanwil DJPb Maluku yaitu Perubahan Halaman III DIPA dan revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
6. Revisi ke-6, tanggal 15 Juli 2025, revisi kewenangan Kanwil DJPb Maluku yaitu Perubahan Halaman III DIPA dan revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
7. Revisi ke-7, tanggal 17 Oktober 2025, revisi kewenangan Kanwil DJPb Maluku yaitu PNBPN - Penggunaan Realisasi PNBPN di Atas Targetnya dengan menambah Pagu PNBPN sebesar Rp73.000.000,-, Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya, Pergeseran PNBPN, Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja, Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
8. Revisi ke-8, tanggal 20 November 2025, revisi kewenangan DJA yaitu Pemenuhan Belanja Operasional, revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja, Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional, dan Pemenuhan Belanja Operasional;
9. Revisi ke-9, tanggal 25 November 2025, revisi kewenangan KPA yaitu revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
10. Revisi ke-10, tanggal 9 Desember 2025, revisi kewenangan KPA yaitu revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
11. Revisi ke-11, tanggal 12 Desember 2025, revisi kewenangan KPA yaitu revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya.

Tabel 4. Besaran Pagu Anggaran PPN Ambon Tahun 2025 (s.d. 31 Desember 2025)

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)
1	Belanja Pegawai	7,822,556,000
2	Belanja Barang	3,860,352,000
3	Belanja Modal	1,060,658,000
Total		12,743,566,000

3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 pencapaian pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, adalah sebesar Rp 12.248.610.417,- atau mencapai 96,12% dari pagu DIPA sebesar Rp12.743.566.000,-, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp494,955,583,- atau 5,88%. Sisa dana tersebut merupakan anggaran dari :

- h. Belanja Pegawai (51) sebesar Rp 109.399.266,-;
2. Belanja Barang (52) sebesar Rp 369,371,766,-;
3. Belanja Modal (53) sebesar Rp 16,184,551,-.

Realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon per jenis belanja dan per jenis kegiatan selama tahun anggaran 2025 sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Realisasi dan Sisa Anggaran PPN Ambon TA. 2025

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi Sebelum Blokir x (1.000)	%	Pagu Diblokir x (1.000)	Pagu Sesudah Blokir x (1.000)	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		x (1.000)					x (1.000)		x (1.000)
1	2338 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	662,782	368,652	55.62%	286.852	375,930	368,652	55.62%	7,277,48
	52. Belanja Barang	569,382	277.675	48,77	286.852	282.530	277.675	98,28	4,854,98
	53. Belanja Modal	93,400	90.978	97,41		93.400	90.978	97,41	2,422,50
2	2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.080.784	11.879.958	98,34	89.294	11.991.490	11.879.958	99	110.981,24
	51. Belanja Pegawai	7.822.556	7.713.157	98,60		7.822.556	7.713.157	98,60	109399,27
	52. Belanja Barang	3.290.970	3.213.305	97,64	77.024	3.213.946	3.213.305	99,98	640,79
	53. Belanja Modal	967.258	953.496	98,58	12.270	954.988	953.496	99,84	941,18
Total		12.743.566	12.248.610	96,12	376.146	12.367.420	12.248.610	99,04	118.258,72

Dalam kegiatan perikanan tangkap ini, PPN Ambon juga melaksanakan pemungutan PNBP sektor perikanan sesuai dengan ketentuan jenis dan tarif PNBP. Pada tahun 2025 target PNBP PPN Ambon Sebesar Rp1.411.016.000,-, realisasi penerimaan sebesar Rp3.315.769.717,- atau (234,99%) dari target. Penerimaan tersebut bersumber dari :

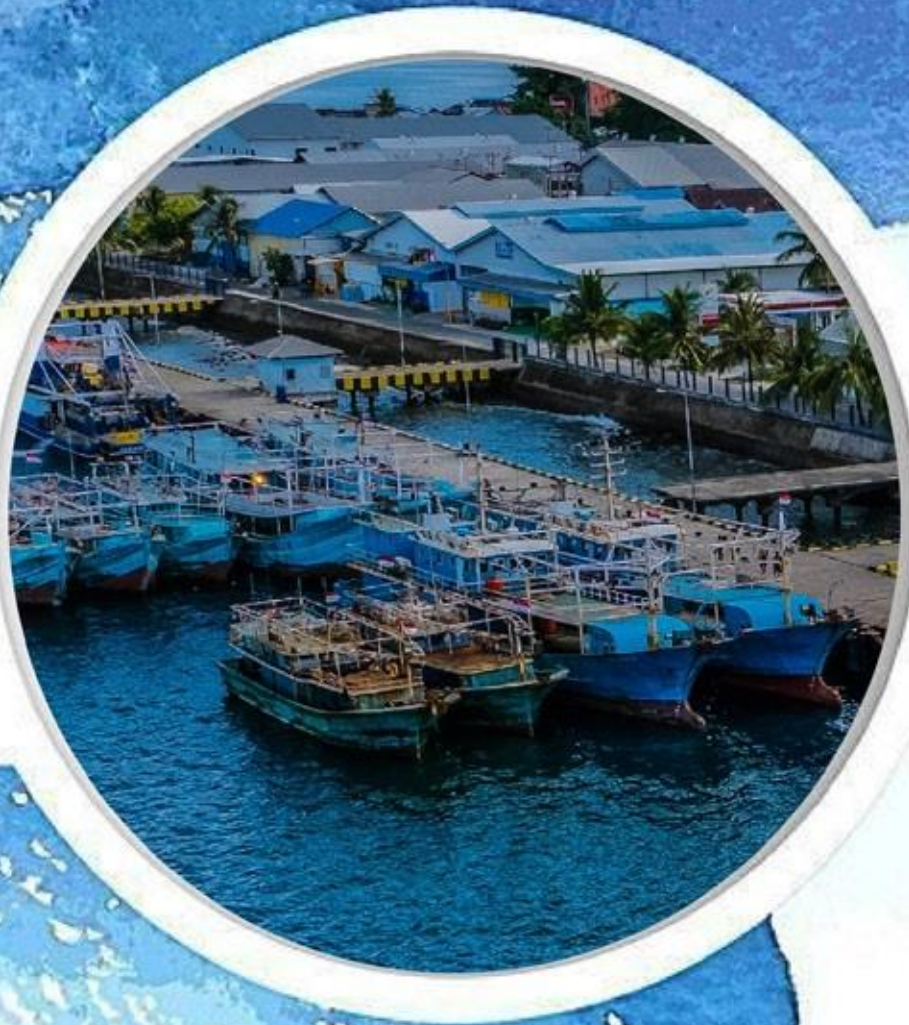
1. Penerimaan Fungsional sebesar Rp2.649.777.807,- merupakan realisasi dari Penerimaan Jasa Pelabuhan antara lain; jasa penggunaan kendaraan, jasa penggunaan sarana dan prasarana, jasa tambat/labuh, jasa pengadaan air, penggunaan *cold room*, jasa pas masuk kendaraan, jasa kebersihan pelabuhan, serta jasa pemakaian listrik;
2. Penerimaan Umum sebesar Rp665.991.910,- merupakan pendapatan jasa penggunaan tanah dan bangunan, penerimaan kembali belanja pegawai TAYL, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin melalui proses lelang Pemerintah, dan pendapatan lainnya.

Setelah adanya revisi DIPA penambahan Pagu PNBP sebesar Rp73.000.000,-total DIPA Pagu PNBP PPN Ambon semula sejumlah Rp971.050.000,- menjadi Rp. 1.044.052.000. PPN Ambon berhak menggunakan sebesar 70,8 % dari total penerimaan/setoran, dan realisasi penggunaan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp736.175.733,- (70,51%). Realisasi penggunaan PNBP secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Realisasi Penggunaan PNBP TA. 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu PNBP	Pagu PNBP.P	Realisasi Penggunaan (Rp)	Capaian (%)	Sisa (Rp)
	Belanja Barang					
1	Belanja Bahan (521211)	209.000.000		208.692.000	99,85	308.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)	55.035.000		55.035.000	100,00	-
	Belanja Modal					
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)	515.301.000		513.560.000	99,66	1.741.000
4	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (532121)	26.669.000		26.668.000	100,00	1.000
	Jumlah	806.005.000	-	803.955.000	99,75	2.050.000

PERENCANAAN KINERJA



BAB IV PERENCANAAN KINERJA

4.1 Rencana Strategis

Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar dunia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal tersebut merupakan modal dasar untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur serta sebagai sebuah bangsa yang tangguh dalam hal politik, keamanan sosial, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Peran strategis tersebut selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pengelolaan laut dan perikanan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis kesejahteraan, sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, maka peran sector kelautan dan perikanan adalah engine growth bagi pertumbuhan ekonomi tinggi yang diwujudkan melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan sumber pertumbuhan baru sehingga dapat memberikan peningkatan nilai tambah dan multiplier effect yang besar. Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 0%, maka pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan secara inklusif dan merata dengan menysasar nelayan, pembudi daya, petambak garam, pengolah, pemasar, dan masyarakat di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana akibat ancaman perubahan iklim.

Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM dicapai melalui pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan vokasi serta penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM kelautan dan perikanan.

Upaya tersebut diperkuat dengan penerapan standardisasi dan sertifikasi guna memastikan tenaga kerja yang ada memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan industri, berdaya saing tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah ke depan, paradigma lama yang hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan perlu ditinggalkan. Sebagai landasan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan, diterapkan paradigma ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Pendekatan ini menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian tekanan terhadap ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi secara terukur, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya produktif, tetapi juga mampu menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Sejalan dengan prinsip tersebut, ekonomi biru menjadi pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Paradigma ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, serta diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota; (3) pengembangan Perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastic di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Sebagai dokumen strategis pembangunan sektor kelautan dan perikanan, dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, indikator kinerja, serta kebutuhan organisasi, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan inovatif non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) dilakukan secara komprehensif untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran nasional. Renstra menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan Renstra KKP tahun 2025-2029, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki sector kelautan dan perikanan guna mengidentifikasi peluang pengembangan di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan yang masih menghambat pembangunan sektor ini juga dikaji secara komprehensif. Analisis tersebut dilengkapi dengan telaah lingkungan strategis, baik nasional maupun global, yang berpotensi mempengaruhi arah pembangunan kelautan dan perikanan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut : **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap Penguatan Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan;
- b. Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0;

- c. Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan;
- d. Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- a. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap, yaitu : Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi Pelabuhan perikanan; Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; Mengakselerasi reformasi tata Kelola dan perizinan usaha perikanan tangkap;
- c. Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayan Pengelolaan Perikanan (WPP);
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Dalam mendukung peran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan visi dan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2025-2029. Adapun Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun 2025 - 2029, yaitu :

VISI

"Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai Pusat Pertumbuhan dan engembangan Ekonomi Perikanan Terpadu untuk mewujudkan Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera "

MISI

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menjalankan 6 (enam) MISI, antara lain :

- a. Peningkatkan Produksi dan Mutu Hasil Perikanan;
- b. Menyediakan Fasilitas dan Jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
- c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- d. Peningkatkan Penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
- e. Peningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),serta
- f. Reformasi Birokrasi PPN Ambon

Menjabarkan misi diatas, maka tujuan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon adalah :

- a. Meningkatkan Produksi Hasil Tangkapan dan Mutu Hasil Perikanan sehingga mampu menciptakan Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing ;
- b. Memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya untuk mendukung pertumbuhan usaha perikanan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perikanan;
- d. Peningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta
- e. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Namun untuk Renstra 2025-2029 KKP telah ditetapkan, sedangkan untuk Renstra DJPT masih dalam proses penyusunan.

4.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan PPN Ambon

Dalam rangka mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon telah menetapkan target-target beserta anggaran di tahun 2025 untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai. Target-target ini dituangkan dalam dokumen rencana kinerja anggaran tahun 2025. Dalam mencapai sasaran strategis, pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sedangkan Sasaran strategis PPN Ambon dalam rangka peningkatan operasional pelabuhan, melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembangunan sarana prasarana serta didukung dengan peningkatan kualitas aparaturnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, yang ingin dicapai dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Sasaran Kegiatan 1 **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat”** dengan Indikator Kinerja :
 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- b. Sasaran Kegiatan 2 **“Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Meningkat”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”**, dengan Indikator Kinerja :
 - Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- c. Sasaran Kegiatan 3 **“Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang optimal dan bertanggung jawab”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat dan Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”**, dengan Indikator Kinerja :
 - Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Nusantara Ambon;
 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon”;
 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

- d. Sasaran Kegiatan 4 **“Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”** dengan Indikator Kinerja:
- Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan;
 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan;
- e. Sasaran Kegiatan 5 **“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan Indikator Kinerja :
- Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;

4.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penitaaian- kebertrasitan/kegagatan pencapatan tujtran- dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

4.4. Target Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan tolok ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang diturunkan dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai berikut:

Tabel 7. Indikator dan Target Kinerja PPN Ambon Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Rp. Juta)	1,411,02
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)	2,364,30
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	84
		5 Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	70
		6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	45
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	885
		9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	45,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	85
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	87
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	76
		15 Persentase Pengelolaan BMN	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	
16		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	92
17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	71,5
18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	88,5

AKUNTABILITAS KINERJA



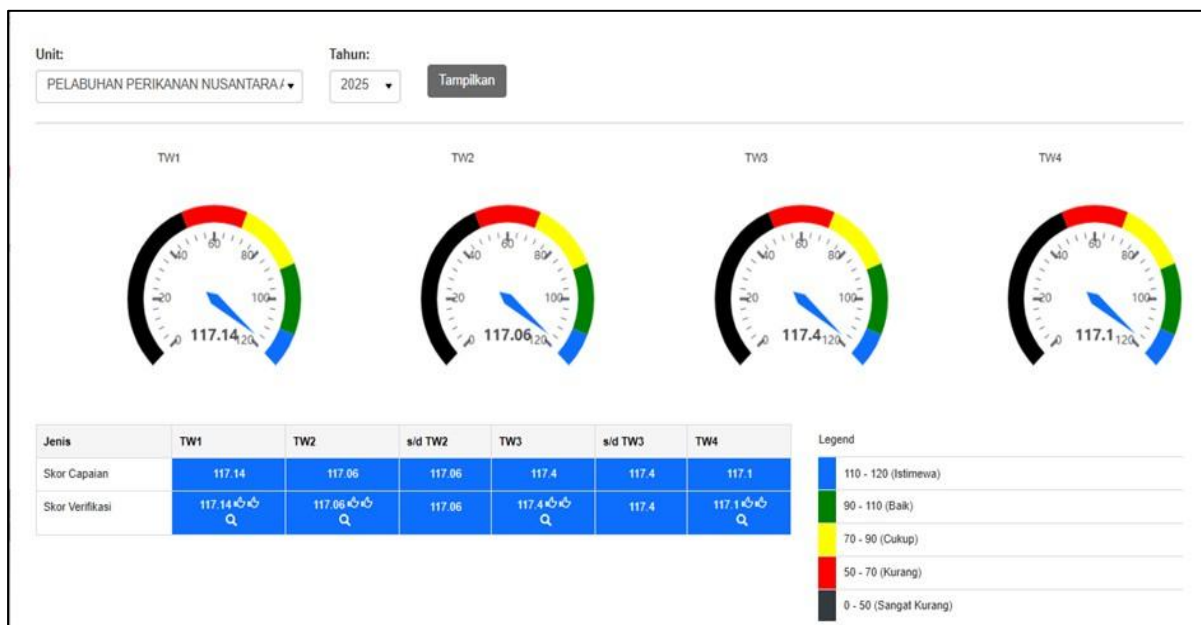
BAB V. AKUNTABILITAS KINERJA

5.1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar 4. Dashboard Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada tahun 2025 memiliki kategori "ISTIMEWA", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 117,1%. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada tahun 2025, seluruh Indikator Kinerja capaiannya $\geq 100\%$. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		CAPAIAN	
			2025	TW IV	2025	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Rp. Juta)	1.441,02	1.411,02	3.315,76	120
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)	2.364,30	2.364,30	3.446,25	120
3	Pengelolaan Perikanan Ambon yang berdaya saing	3 Persentase permohonan pengusaha yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	100	100	100	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	84	84	90,58	107,83
		5 Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	70	70	98,33	120
		6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	45	45	83,76	120
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	30,1	30,1	83,85	120
		8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	885	885	1.734	120
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, dan alat penangkapan ikan					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		CAPAIAN	
			2025	TW IV	2025	%
	berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	0,26	0,68	120
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	45,5	45,5	58,72	120
		11 Persentase Hasil Rekomendasi yang Pengawasan Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	85	85	100	117,65
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	88	88	88,5	100,57
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	87	87	90,03	103,48
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	76	76	100	120
		15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	81	81	90	111,11
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	92	92	98,01	106,53
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	71,50	71,50	96,67	120
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	88,50	88,50	91,47	103,36

Capaian kinerja PPN Ambon Tahun 2025 dipengaruhi oleh adanya perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen di PPN Ambon. Dalam meningkatkan kinerja kedepan seluruh Tim Kerja sebagai penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Pengelola Kinerja PPN Ambon agar melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian periode berikutnya. Komitmen dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup PPN Ambon diharapkan dapat mendukung kinerja yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

5.2. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di PPN Ambon Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp12.743.566.000 sesuai dengan DIPA PPN Ambon TA.2025 dengan Nomor : SP DIPA-032.03.2.622461/2026 tanggal 01 Desember 2025. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (Dua) kegiatan utama sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan;
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp12.248.610.417 atau sebesar 96,12 % dari total PAGU Anggaran Tahun 2025.

Tabel 9. Penyerapan Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan		Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi
1	Pengelolaan Perikanan	Pelabuhan	662.782.000	368.652.519	55,62	44.38
2	Program Manajemen Internal	Dukungan	12.080.784.000	11.879.957.898	98,34	1.66
Jumlah			12.743.566.000	12.248.610.417	96,12%	3.88

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua jenis efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Presentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tidak terlepas dari adanya anggaran sebagai motor penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan dalam rangka melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Pada tahun 2025, pagu anggaran untuk semua kegiatan adalah Rp14.269.659.000,00, sementara realisasi anggaran untuk semua program dan kegiatan yaitu Rp14.247.429.972,00. Dengan menggunakan rumus efisiensi, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 0,16%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2025 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan melakukan pembagian tugas pegawai sesuai dengan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh satker, yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang harus dicapai oleh masing-masing pegawai dalam rangka penilaian prestasi kerja pegawai setiap tahunnya. Selain itu, melalui pelibatan banyak pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas, pengadaan sarana dan prasarana, penggunaan tenaga ahli sebagai pemateri, dan memaksimalkan peran serta *stakeholder* dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja untuk petugas pelayanan.

Target anggaran yang ditetapkan, direncanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
1	Nilai PNBP sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Ambon	78.000.000	77.109.000	120%	98,86%
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Ambon Meningkat	86.840.000	86.840.000	120%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang berdaya saing	836.631.000	830.381.990	108,93%	99,25%
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang Optimal	608.744.000	606.522.229	120%	99,64%
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	13.787.000	13.787.000	120%	100%
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di PPN Ambon	37.213.000	35.213.000	120%	94,63
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Ambon	12.608.444.000	12.597.576.753	110,61%	99,91%
Jumlah/ Persentase		14.269.659.000	14.247.429.972	117,14%	99,84%

KERAGAAN OPERASIONAL



BAB VI. KERAGAAN OPERASIONAL PELABUHAN

Operasional pelabuhan perikanan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan baik fungsi pemerintahan maupun fungsi perusahaan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kegiatan operasional pelabuhan perikanan mencakup berbagai aspek mulai dari pelayanan kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran logistik, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Operasional pelabuhan juga mencakup kegiatan kesyahbandaran untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam pelaksanaannya, skala atau tingkat operasional pelabuhan perikanan tidak hanya dipengaruhi oleh potensi sumber daya ikan dan intensitas aktivitas perikanan tangkap di wilayah sekitarnya, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas fasilitas serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan mendukung operasional pelabuhan tersebut. Keempat faktor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan seberapa optimalnya operasional suatu pelabuhan perikanan.

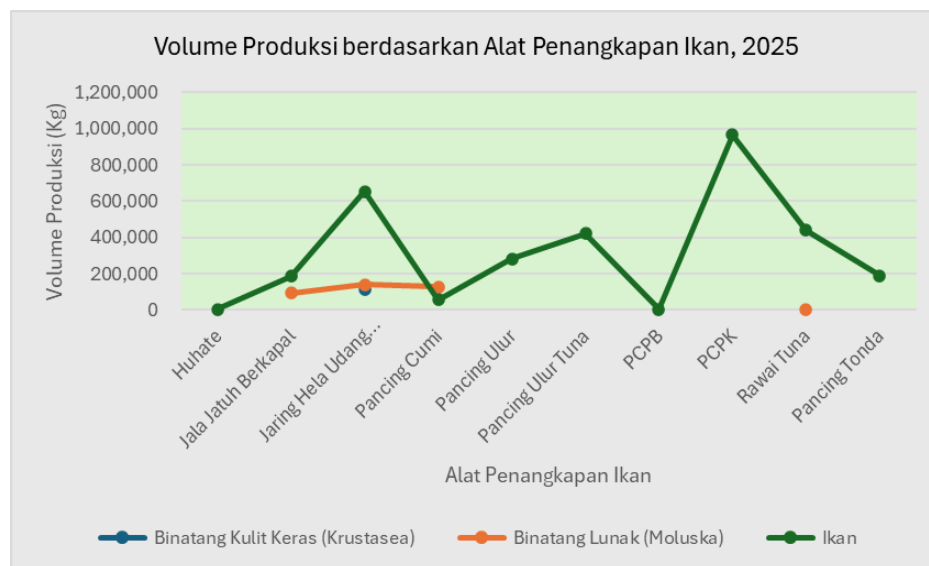
6.1. Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan

Volume produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon pada tahun 2025 mencapai 3.679 ton, meningkat sebesar 28,59% dibandingkan volume produksi pada tahun 2024 yang tercatat sebanyak 2.627 ton. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penambahan armada penangkapan berukuran di atas 30 GT.



Gambar 5. Aktivitas Pendaratan Hasil Tangkapan

Hasil tangkapan yang didaratkan didominasi oleh hasil tangkapan kapal perikanan dengan alat tangkap pukat cincin pelagis kecil sebanyak 967 ton (26,29%), diikuti jaring hela udang berkantong sebanyak 907 ton (24,67%), rawai tuna sebanyak 439 ton (11,92%), pancing ulur tuna sebanyak 423 ton (11,49%), pancing ulur sebanyak 282 ton (7,68%), jala jatuh berkapal sebanyak 278 ton (7,57%), pancing tonda sebanyak 189 ton (5,13%), pancing cumi sebanyak 186 ton (5,05%), pukat cincin pelagis besar sebanyak 5 ton (0,13%) dan huhate sebanyak 2 ton (0,07%).



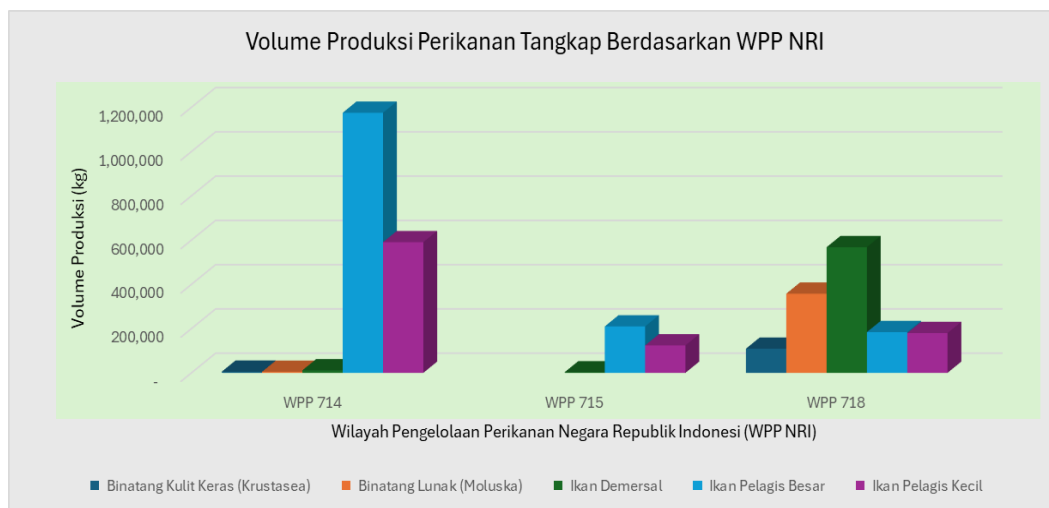
Gambar 6. Grafik Volume Produksi Berdasarkan Alat Penangkap Ikan

Jika berdasarkan jenis atau kelompok ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, volume produksi didominasi oleh kelompok ikan pelagis besar sebanyak 1.569 ton (42,65%), diikuti oleh kelompok ikan pelagis kecil sebanyak 894 ton (24,30%), kelompok ikan demersal sebanyak 581 ton (15,80%), kelompok binatang lunak sebanyak 362 ton (9,85%), kelompok ikan karang sebanyak 158 ton (4,29%), dan yang terendah adalah kelompok binatang kulit keras sebanyak 114 ton (3,11%).

Volume produksi berdasarkan kelompok dan jenis ikan terbagi atas empat kelompok, yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, demersal dan karang. Pada kelompok ikan pelagis besar, didominasi oleh ikan madidihiang sebanyak 588 ton (15,99%), tuna mata besar sebanyak 470 ton (12,76%), dan tongkol komu sebanyak 206 ton (5,60%). Diikuti oleh kelompok ikan pelagis kecil, produksi didominasi oleh ikan layang sebanyak 635 ton (17,26%) dan selar sebanyak 99 ton (2,70%) dari total ikan yang didaratkan. Selanjutnya pada kelompok ikan demersal, didominasi oleh ikan lencam sebanyak 140 ton (3,82%), dan kuwe sebanyak 115 ton (3,13%). Untuk

kelompok binatang lunak, didominasi oleh jenis cumi-cumi sebanyak 354 ton (9,62%). Untuk kelompok ikan karang, didominasi oleh ikan kaci-kaci sebanyak 45 ton (1,24%), sedangkan pada kelompok binatang kulit keras, didominasi oleh udang banana sebanyak 48 ton (1,31%).

Berdasarkan hasil tangkapan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada tahun 2025 menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), produksi didominasi oleh hasil tangkapan dari WPP NRI 714 (Laut Banda) sebanyak 1.787 ton (48,57%), diikuti oleh WPP NRI 718 (Laut Arafura) sebanyak 1.556 ton (42,30%), dan WPP NRI 715 (Laut Maluku) sebanyak 336 ton (9,13%) sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 7. Grafik Volume Produksi Menurut Kelompok Ikan dan WPP

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kelompok ikan pelagis besar ditemukan di semua WPP NRI dengan volume produksi tertinggi pada WPP NRI 714, yakni sebanyak 1.175 ton atau 31,94% dari total volume produksi yang didaratkan di PPN Ambon. Selanjutnya, kelompok ikan pelagis kecil memiliki volume produksi dominan yaitu 590 ton (16,05%) di WPP NRI 714, dan diikuti oleh ikan demersal di WPP NRI 718 sebanyak 568 ton (15,43%). Sementara itu, volume produksi terendah terdapat pada kelompok jenis ikan demersal, yang meskipun ditemukan di semua WPP NRI tetapi volume produksinya relatif kecil, yakni WPP NRI 715 sebanyak 2.157 kg (0,06%).

Berdasarkan target volume produksi tahun 2025 sebesar 2.364.351 kg (2.364 ton), realisasi pencapaian produksi mencapai 155,6%, yaitu sebanyak 3.679.091 kg (3.679 ton), dengan nilai produksi sebesar Rp. 101.808.124.100,- . Volume dan nilai

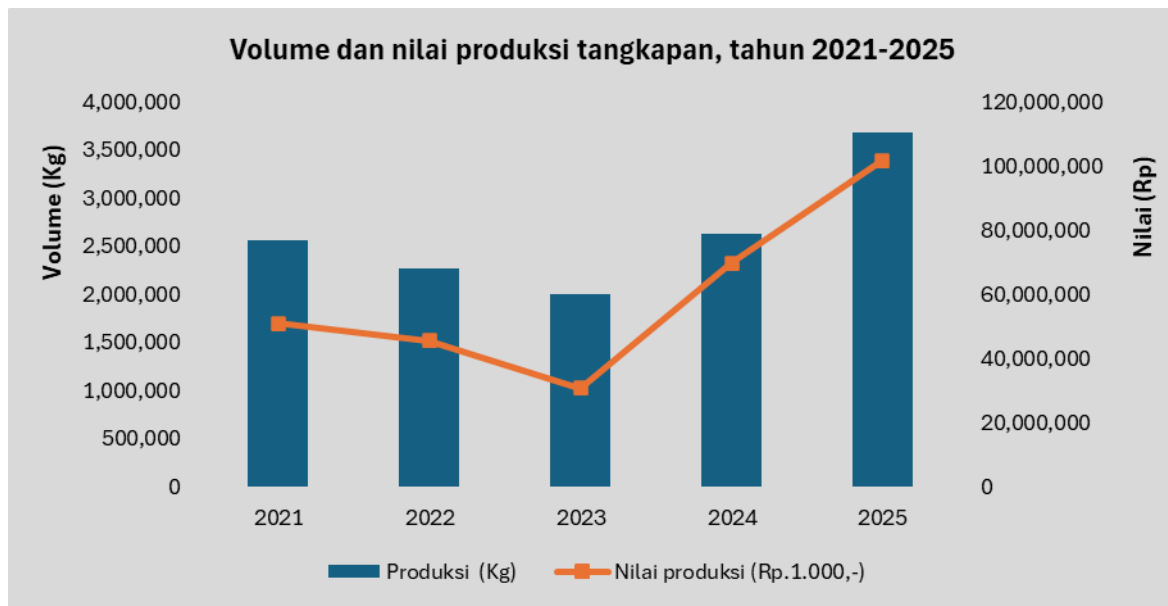
produksi hasil pendaratan per bulan di PPN Ambon pada tahun 2025 dan perbandingannya dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11. Perbandingan produksi dari nilai produksi ikan tahun 2024 - 2025

Bulan	Tahun 2024		Tahun 2025		Harga rata-rata (Rp.)	
	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	2,061,000		2,061,000			
Jumlah	2,627,057	69,923,979,750	3,679,091	101,808,124,100	26,617	27,672
Kenaikan	rata-rata	(%)	40.05	45.60		3.96
Januari	132,348	4,101,280,000	353,833	10,288,525,500	30,989	29,077
Pebruari	198,674	5,786,404,000	148,173	3,419,085,000	29,125	23,075
Maret	211,708	5,552,642,500	447,062	11,258,787,500	26,228	25,184
April	188,686	4,765,509,000	400,283	12,655,358,300	25,256	31,616
Mei	229,427	6,948,341,000	190,563	4,914,275,300	30,286	25,788
Juni	205,142	6,207,386,000	174,774	4,813,657,000	30,259	27,542
Juli	223,576	4,871,173,000	213,774	5,995,683,000	21,788	28,047
Agustus	255,488	6,395,873,000	260,952	7,799,831,000	25,034	29,890
September	331,856	8,903,560,750	209,018	4,904,321,000	26,830	23,464
Oktober	202,167	5,273,227,000	370,419	10,079,412,000	26,084	27,211
November	209,166	5,660,089,500	334,403	9,036,195,500	27,060	27,022
Desember	238,819	5,458,494,000	575,837	16,642,993,000	22,856	28,902

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan produksi per bulan pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya peningkatan. Volume produksi tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada bulan September, sedangkan pada tahun 2025 puncaknya terjadi pada bulan Desember dengan volume mencapai 575.837 kg. Sementara itu, produksi terendah pada tahun 2024 tercatat pada bulan Januari dan pada tahun 2025 terjadi pada bulan Februari, yakni sebanyak 148.173 kg. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya volume produksi pada bulan tertentu dipengaruhi oleh faktor lingkungan berupa iklim, cuaca, serta faktor lainnya berupa jumlah armada penangkapan, dan musim penangkapan.

Adapun volume produksi selama lima tahun terakhir (periode 2021-2025) sangat berfluktuasi, dengan persentase kenaikan sebesar 8,01%. Volume produksi tertinggi tercatat pada tahun 2025 yaitu sebesar 3.679 ton, sedangkan volume produksi terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2.001 ton, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 8. Grafik Volume dan Nilai Produksi Tahun 2021 - 2025

6.2. Pemasaran dan Distribusi Hasil Tangkapan

Untuk kegiatan pemasaran dan distribusi hasil tangkapan, pemilik kapal perikanan di PPN Ambon telah melakukan hubungan kerja sama dalam memasarkan hasil tangkapan dengan perusahaan perikanan yang ada di negara tujuan, daerah tujuan pasaran regional, dan pasaran lokal, sehingga ikan hasil tangkapan yang didaratkan telah memiliki tujuan pemasaran yang pasti. Adapun distribusi dan pemasaran hasil perikanan oleh unit pengolahan ikan (UPI) yang ada di PPN Ambon pada tahun 2025 meliputi 3 (tiga) tujuan pemasaran yaitu lokal, regional, dan ekspor, baik berupa produk ikan beku dan hasil olahan.

Tujuan pemasaran secara lokal yaitu didistribusikan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Pulau Ambon, sedangkan pada pemasaran regional (antar pulau/daerah) dengan tujuan yaitu Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Pada pemasaran dengan tujuan ekspor (luar negeri) biasanya didistribusikan ke Vietnam, Filipina, dan Thailand berupa produk tuna loin beku. Total volume dan nilai produksi yang dipasarkan serta didistribusikan dari PPN Ambon pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Distribusi dan pemasaran volume perikanan tangkap tahun 2025

BULAN	DISTRIBUSI PERUSAHAAN						TOTAL	
	Lokal		Regional		Eksport		Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)
	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)		
Jumlah	435,610	8,798,179,600	1,774,401	46,106,797,300	487,900	33,508,500,000	2,697,911	88,413,476,900
Januari	10,600	252,000,000	86,970	2,473,712,200	52,000	3,640,000,000	149,570	6,365,712,200
Pebruari	91,497	1,800,438,000	32,038	684,107,800	91,000	6,370,000,000	214,535	8,854,545,800
Maret	20,810	416,070,000	171,706	5,174,298,600	52,000	3,640,000,000	244,516	9,230,368,600
April	56,193	1,177,060,000	29,031	1,930,682,600	26,000	2,080,000,000	111,224	5,187,742,600
Mei	75,260	1,650,722,600	43,787	2,481,878,400	34,000	2,380,000,000	153,047	6,512,601,000
Juni	37,240	888,490,000	69,430	2,698,441,400	39,000	2,535,000,000	145,670	6,121,931,400
Juli	43,460	1,078,825,000	83,681	2,489,210,800	26,000	1,560,000,000	153,141	5,128,035,800
Agustus	7,330	129,160,000	201,177	4,574,138,900	26,000	1,560,000,000	234,507	6,263,298,900
September	4,500	70,515,000	225,670	4,034,965,000	37,900	2,463,500,000	268,070	6,568,980,000
Oktober	67,485	856,994,000	149,370	4,536,500,500	26,000	1,820,000,000	242,855	7,213,494,500
Nopember	15,935	354,005,000	194,689	4,231,385,400	26,000	1,820,000,000	236,624	6,405,390,400
Desember	5,300	123,900,000	486,852	10,797,475,700	52,000	3,640,000,000	544,152	14,561,375,700

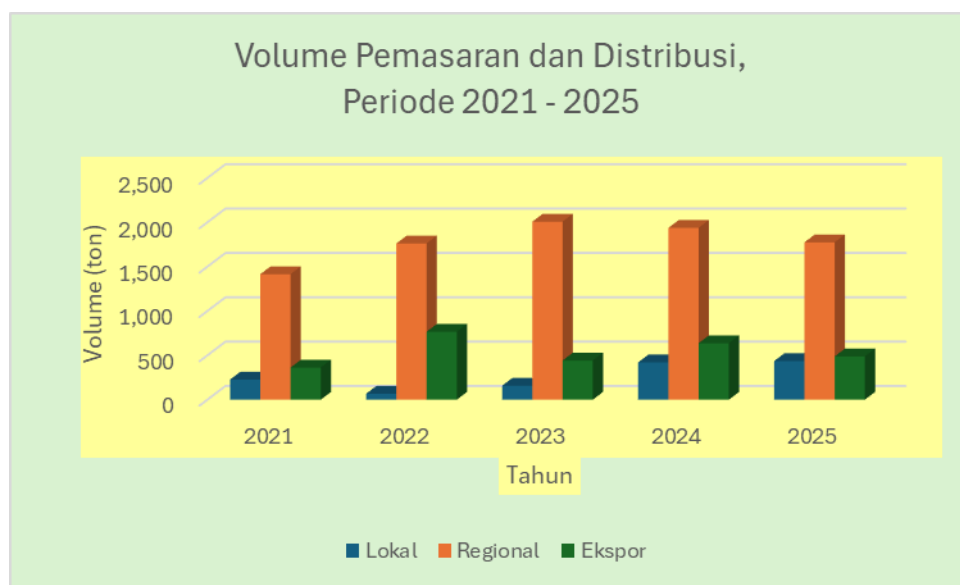
Total ikan yang didistribusikan melalui UPI di PPN Ambon pada tahun 2025 mencapai 2.698 ton. Distribusi ikan didominasi oleh skala regional sebanyak 1.774 ton (65,77%), diikuti oleh skala ekspor sebesar 488 ton (18,08%), dan skala lokal sebanyak 436 ton (16,15%). Distribusi ikan dari PPN Ambon pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 11,01% dibandingkan tahun 2024 (2.995 ton).

Distribusi dan pemasaran ikan di PPN Ambon mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dua faktor. Selain hasil tangkapan dari kapal perikanan berukuran <100 GT yang mendaratkan ikan di pelabuhan, distribusi juga dipengaruhi oleh pasokan hasil tangkapan yang masuk melalui jalur darat, yang dibeli oleh perusahaan dari nelayan-nelayan kecil di sekitar Pulau Ambon dan Pulau Seram. Adapun data pemasaran dan distribusi ikan berdasarkan tujuan pemasaran selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Distribusi ikan berdasarkan wilayah pemasaran periode tahun 2020 -2025

Tahun	Jumlah (ton)	Distribusi Pemasaran (ton)		
		Lokal	Regional	Ekspor
2021	2.005	227	1.415	362
2022	2.595	67	1.761	766
2023	2.607	158	2.007	442
2024	2.995	421	1.937	637
2025	2,698	436	1,774	488
Jumlah	12,900	1,309	8,894	2,695

Berdasarkan wilayah distribusi dan pemasaran ikan, selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan sebesar 0,24%. Volume pemasaran dan distribusi tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2024, yakni sebanyak 2.995 ton. Namun, jika dilihat berdasarkan wilayah tujuan distribusi dan pemasaran maka tahun 2023 mengalami peningkatan pada pasar regional/antar pulau, dengan volume mencapai 2.007 ton. Kondisi ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,23% dibandingkan periode 2020-2022, yang rata-rata volumenya berkisar di 2.580 ton. Peningkatan tersebut seiring dengan tingginya permintaan di daerah tujuan. Adapun data pemasaran dan distribusi ikan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9. Grafik Distribusi Ikan Berdasarkan Wilayah Pemasaran Tahun 2021 - 2025

6.3. Pembinaan dan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB)

Hasil perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perikanan nasional terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa negara, pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bangsa pada umumnya, nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan, dengan tetap memelihara lingkungan, ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan. Untuk mewujudkan peranan tersebut, hasil perikanan Indonesia harus dapat memenuhi persyaratan yang dapat menjamin mutu dan keamanan yang diinginkan oleh konsumen sehingga dapat bersaing baik di pasar nasional maupun

internasional yang akhirnya akan menjaga kestabilan dan peningkatan produksi serta pemasaran hasil perikanan.

Tujuan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Dengan demikian, peran pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan ikan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga dapat menghasilkan produk-produk perikanan tangkap yang bermutu dan bernilai ekonomis tinggi. Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).

Cara penanganan ikan yang baik, yang selanjutnya disebut CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran ikan dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan. CPIB menguraikan standar minimum yang perlu dipenuhi kapal penangkap ikan, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) : personel, fasilitas kapal, peralatan, pengawasan proses, hasil tangkap, dan operasi penanganan dan penyimpanan.

Salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jederal Perikanan Tangkap untuk menjamin kualitas produk hasil perikanan tangkap adalah dengan melaksanakan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) untuk nakhoda kapal perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) sebanyak 3 kali dengan menerbitkan 232 sertifikat untuk nakhoda kapal perikanan.

6.4. Pelaksanaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) merupakan system informasi yang berfungsi untuk mendukung pengembangan pelabuhan perikanan dalam menciptakan kawasan andalan yang strategis, produktif dan cepat tumbuh sebagai sentra produksi dan industri bagi pengembangan ekonomi terpadu. PIPP

menginformasikan dinamika kegiatan pelabuhan perikanan seluruh Indonesia kepada stakeholder kelautan dan perikanan melalui media internet pada situs <https://pipp.kkp.go.id> dengan dukungan data operasional pelabuhan pada masing-masing pelabuhan perikanan yang dikirim secara berkala.

Kegiatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon selama Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dalam berbagai jenis kegiatan seperti :

- a. Entry data harian, bulanan dan situasional;
- b. Informasi mengenai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon yang dapat diakses melalui:
 - Website: <https://pipp.kkp.go.id>
 - Website KKP: kkp.go.id/djpt/ppnambon
 - Facebook: Humas PPN Ambon
 - Instagram: PPN Ambon
 - Twitter: PPN Ambon
 - YouTube: PPN Ambon
- c. Pelaksanaan publikasi : media sosial Humas PPN Ambon selalu aktif memberikan segala informasi perikanan tangkap, baik itu aktifitas pelabuhan maupun kegiatan-kegiatan terkait dengan perikanan.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja pada laman Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang diperoleh pada tiap semester I dan II tahun 2025, kinerja PPN Ambon tergolong dalam kategori "Sangat Baik", sebagaimana ditunjukkan pada tabel indikator penilaian kinerja pelabuhan di bawah. Berdasarkan tabel indikator penilaian kinerja pelabuhan terdapat sebanyak 27 jenis kriteria yang saling mempengaruhi dalam proses penilaian.

Tabel 14. Tingkat Operasional Pelabuhan Berdasarkan Evaluasi Kinerja PIPP

NO	KRITERIA	SATUAN	BULAN						BULAN						BULAN						BULAN						
			TRIWULAN I						TRIWULAN II						TRIWULAN III						TRIWULAN IV						
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		
Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai				
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	18,00	4,00	16,00	4,00	22,00	5,00	14,00	4,00	25,00	5,00	22,00	5,00	19	4	21	5	23	5	28	5	25	5	23	5	
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2	Ya	2	Ya	2	Ya	2	Ya	2	Ya	2	
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2	Ya	2	Ya	2	Ya	2	Ya	2	Ya	2	
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2	Ya	2	Ya	2	Ya	2	Ya	2	Ya	2	
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	
6	Pendapatan Pelabuhan	%	172,97	4,00	244,68	4,00	209,61	4,00	304,04	4,00	183,91	4,00	153,03	4,00	99.9698	4	210.5249	4	562.0353	4	415.6279	4	269.1948	4	363.5956	4	
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	Lengkap	4,00	Lengkap	4,00	Lengkap	4,00	Lengkap	4,00	Lengkap	4,00	Lengkap	4	Lengkap	4	Lengkap	4	Lengkap	4	Lengkap	4	Lengkap	4	
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	1.281,00	2,00	762,00	2,00	1.557,00	3,00	1.292,00	2,00	980,00	2,00	1.124,00	2,00	1299	2	1354	2	881	2	1893	3	1076	2	1492	2	
9	Panjang Dermaga	m	498,00	4,00	498,00	4,00	498,00	4,00	498,00	4,00	498,00	4,00	498,00	4,00	498	4	498	4	498	4	498	4	498	4	498	4	
10	Kedalaman Kolam	cm	2.000,00	4,00	2.000,00	4,00	2.000,00	4,00	2.000,00	4,00	2.000,00	4,00	2.000,00	4,00	2000	4	2000	4	2000	4	2000	4	2000	4	2000	4	
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	0,50	Tidak Ada	0,50	Tidak Ada	0,50	Tidak Ada	0,50	Tidak Ada	0,50	Tidak Ada	0,50	Tidak Ada	0.5	Tidak Ada	0.5	Tidak Ada	0.5	Tidak Ada	0.5	Tidak Ada	0.5	Tidak Ada	0.5	
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Kurang	1,00	Kurang	1,00	Kurang	1,00	Kurang	1,00	Kurang	1,00	Kurang	1,00	Kurang	1	Kurang	1	Kurang	1	Kurang	1	Kurang	1	Kurang	1	
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	5,70	2,00	5,70	2,00	5,70	2,00	5,70	2,00	5,70	2,00	5,7	2,00	5.7	2	5.7	2	5.7	2	5.7	2	5.7	2	5.7	2	
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	104,00	5,00	67,00	5,00	497,00	5,00	224,00	5,00	95,00	5,00	87,00	5,00	363	5	169	5	124	5	322	5	142	5	339	5	
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	10,31	3,75	3,27	2,50	12,11	3,75	9,72	3,75	4,37	2,50	3,57	2,50	5.269258	3.75	5.504516	3.75	4.340433	2.5	9.109065	3.75	8.0897	3.75	12.00632	3.75	
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	49,00	5,00	33,00	5,00	44,00	5,00	31,00	5,00	39,00	5,00	45,00	5,00	43	5	50	5	37	5	46	5	44	5	46	5	
17	STBLKK	%	128,57	5,00	142,42	5,00	163,63	5,00	170,96	5,00	151,28	5,00	108,89	5,00	139.5349	5	139.2857	5	121.5686	5	110	5	96.36364	3.75	70.58824	2.5	
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	1,00	1,00	4,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00	6,00	4,00	7	4,00	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	
19	Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	5,00	4,00	10,00	4,00	12,00	4,00	5,00	4,00	7,00	4,00	6,00	4,00	5	4	6	4	6	4	8	4	5	4	5	4	
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	Baik	4,00	Baik	4,00	Baik	4,00	Baik	4,00	Baik	4,00	Baik	4	Baik	4	Baik	4	Baik	4	Baik	4	Baik	4	
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolah)	%	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100	5	100	5	100	5	100	5	100	5	100	5	
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	131,27	3,00	131,27	3,00	131,27	3,00	131,27	3,00	131,27	3,00	131,27	3,00	131.2734	3	131.2734	3	131.2734	3	131.2734	3	131.2734	3	131.2734	3	
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang /Bulan	1.042,50	2,25	1.014,66	2,25	1.142,81	2,25	1.035,13	2,25	1.007,50	2,25	1005,27	2,25	1043.2	2.25	1019.05	2.25	1004.936	2.25	1088	2.25	1047	2.25	1068.211	2.25	
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	erusahaan/ Bulan	4 (60)	4,00	4 (60)	4,00	4 (60)	4,00	4 (60)	4,00	4 (61)	4,00	5 (63)	4,00	4 (63)	4	2 (63)	2	4 (64)	4	4 (64)	4	5 (65)	4	4 (65)	4	
Jumlah				87.50		89.25		83.50		90.50		90.25		90.25		90.50		89.50		90.25		92.50		90.25		89.00	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGATBAIK		SANGATBAIK		BAIK		SANGATBAIK		SANGATBAIK		SANGATBAIK		SANGATBAIK		SANGATBAIK		SANGATBAIK		SANGATBAIK		SANGATBAIK		SANGATBAIK	
Rata-rata Triwulan				86.75						90.33						90.08						90.58					
Target Per Triwulan				84.00						84.00						84.00						84.00					

6.5. Penangkapan Ikan Terukur mendukung PNBP SDA Pasca Produksi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dijelaskan bahwa penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (UPT KKP) dan sebagai sentra perikanan terbesar di Kota Ambon, Provinsi Maluku. PPN Ambon termasuk dalam Zona Penangkapan 03 yang meliputi WPP NRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau), WPP NRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur) serta WPP NRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda) dengan alat tangkap dan sumberdaya ikan yang ditangkap pun juga beragam dan berbeda pada masing-masing WPP.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman <https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pit/> yaitu Nilai PHP Pascaproduksi di Pelabuhan Perikanan, perolehan PNBP SDA di PPN Ambon belum memenuhi target sebesar Rp. 4.000.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 3.129.065.318 atau 78,23%. Hal ini dikarenakan jumlah kunjungan kapal dan volume produksi yang didaratkan sehingga berpengaruh pada nilai PHP pascaproduksi. Berikut nilai PHP PNBP Pascaproduksi di PPN Ambon selama tahun 2025.

Tabel 15. Realisasi PNBP SDA di PPN Ambon Tahun 2025

Uraian	Volume Produksi (Kg)	Nilai PNBP (Rp.)
5% (Kapal ≤ 60 GT)	1,147,730	896,198,943
10% (Kapal > 60 GT)	929,937	2,232,866,375
Total	2,077,667	3,129,065,318

Realisasi	3,129,065,318
Target	4,000,000,000
Presentase (%)	78.23

Jumlah frekuensi kapal perikanan dengan skema pasca produksi yang melakukan aktivitas pembongkaran ikan di PPN Ambon sebanyak 365 kali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dikenakan kepada pelaku usaha perikanan tangkap yang memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pascaproduksi. Besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh kepala pelabuhan perikanan berdasarkan formula, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Penghitungan PNBP Pascaproduksi (Rp.):} \\ &= \text{Indeks tarif} \times \text{nilai produksi ikan pada saat didaratkan (Rp.)} \end{aligned}$$

Di mana, Indeks tarif sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 5% (lima persen) untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*; dan
- 10% (sepuluh persen) untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 60 (enam puluh) *gross tonnage*.

Realisasi pendapatan PNBP SDA Pasca produksi pada tahun 2025, di mana nilai PNBP SDA tertinggi pada bulan Desember 2025 dan terendah pada bulan Februari 2025. Realisasi pendapatan PNBP SDA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Rincian realisasi PNBP SDA di PPN Ambon per bulan Tahun 2025

Bulan	Jumlah Kapal Yang Mendarakan (trip)	Volume Produksi (Kg)	Nilai PNBP SDA (Rp.)
Jan	28	246,312	232,125,040
Feb	21	42,473	27,089,350
Mar	26	300,201	238,009,105
Apr	13	59,252	100,993,201
Mei	26	196,255	297,921,295
Jun	19	83,239	211,782,450
Jul	37	8,598	187,581,677
Agu	43	110,073	82,629,025
Sep	33	112,544	109,472,870
Okt	40	283,020	462,089,835
Nov	38	217,712	348,308,170
Des	41	417,988	831,063,300
Total	365	2,077,667	3,129,065,318

6.6. Kesyahbandaran

Dalam rangka menjaga keselamatan operasional pelayaran kapal perikanan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Tahun 2025 Syahbandar yang bertugas di PPN Ambon berjumlah 4 orang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.2657/DJPT.4/PI.310/IX/2025 Tanggal 8 September 2025. Para Syahbandar ini bertugas menjalankan fungsi kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan pelabuhan binaan yang tersebar di Papua dengan penempatan sebagai berikut.

Tabel 17. Penempatan Syahbandar di PPN Ambon & Pelabuhan Binaan

No	Nama	NIP	Penempatan
1	Ramli makkawaru	196912212008011000	PPN Ambon
			PPP Sorong
			PP Sanggeng
			PP Klademak
2	Hasan Rumaf	198503282009011000	PPN Ambon
			PP Sanggeng
3	Jimmy P. Sangadji	198309112007011000	PPN Ambon
			PP Fandoi
4	Lartha Alpa Unawekla	197808142002121000	PP Poumako
			PP Dulan Pokpok
5	Susanto Masita	198205292006051000	PPN Merauke

fungsi kesyahbandaran dijalankan dengan mengacu pada tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sesuai amanat Undang-Undang terdiri atas:

1. Menerbitkan persetujuan berlayar;
2. Mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan;
3. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;

4. Memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat Penangkapan Ikan, dan alat bantu Penangkapan Ikan;
5. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
6. Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan Ikan;
7. Mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
8. Mengawasi pemanduan;
9. Mengawasi pengisian bahan bakar;
10. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan;
11. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
12. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan;
13. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
14. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan;
15. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
16. Memeriksa Sertifikat Ikan hasil tangkapan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan, terdapat 2 tugas yang tidak dijalankan yaitu mengawasi pemanduan serta mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan. Kedua hal ini tidak dapat dijalankan karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon belum memiliki fasilitas (kapal pandu) dalam pelaksanaan tugas pemanduan, dan tidak ada kegiatan pemeliharaan ataupun pengembangan fasilitas pelabuhan.

6.6.1. Pelayanan Persetujuan Berlayar (PB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, Persetujuan Berlayar (PB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan operasional (kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan). Persetujuan Berlayar (PB) diberlakukan dan diterbitkan secara online melalui alamat website www.integrasi.djpt.kkp.go.id. Aplikasi ini mencakup data kapal baik kapal berizin pusat maupun daerah. Penerbitan PB dilakukan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan tangkap yang disahkan oleh Kepala Pelabuhan. Alur penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) di PPN Ambon dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 10. Alur Pelayanan Penebitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total SPB yang diterbitkan pada tahun 2025 sebanyak 686 lembar, meningkat sebesar 24,9% dari tahun 2024, di mana didominasi oleh kapal dengan alat tangkap pancing ulur (tuna) sebanyak 235 lembar (34%), diikuti oleh kapal pengangkut sebanyak 163 lembar (24%), kapal dengan alat tangkap pancing tonda sebanyak 102 lembar (15%), dan kapal dengan alat tangkap pancing cumi sebanyak 43 lembar (6%) dengan rincian seperti yang tertera pada tabel di bawah.

Tabel 18. Penerbitan PB Berdasarkan Jenis Kapal dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025

Bulan	Jenis Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (API)												Jumlah
	Huhate	Jala Jatuh Berkapal	JHUB	Pancing Cumi	Pancing Ulur	Pancing Ulur Tuna	Pengangkut	PCPB	PCPK	Pukat Labuh	Rawai Tuna	Tonda	
Januari	3	-	-	1	-	19	21	-	2	-	3	10	59
Februari	1	-	4	2	-	19	14	2	3	2	-	7	54
Maret	6	-	-	2	-	12	12	2	1	3	1	5	44
April	1	-	1	-	-	6	19	2	2	1	-	5	27
Mei	3	-	2	4	-	19	13	1	5	-	3	9	59
Juni	-	3	-	15	-	15	5	2	5	-	5	7	57
Juli	3	4	3	9	-	23	9	-	2	-	-	12	63
Agustus	1	16	2	5	3	24	13	1	-	-	3	13	81
September	1	5	3	4	2	19	17	1	2	-	1	8	63
Oktober	2	2	1	1	4	22	15	1	2	-	5	12	66
November	-	-	2	-	2	26	10	1	2	-	3	8	54
Desember	-	-	3	-	-	20	16	-	1	-	2	7	47
Total	21	30	21	43	11	224	164	13	27	6	26	102	686

Adapun penerbitan PB di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2025 dipengaruhi oleh jumlah kapal berpangkalan dan waktu operasional kapal perikanan. Kapal-kapal dengan ukuran di bawah 30 GT memiliki hari operasi yang lebih pendek, sehingga berpengaruh pada peningkatan frekuensi kunjungan dan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB).

Jumlah kapal yang aktif dan berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2025 didominasi oleh kapal-kapal dengan ukuran di bawah 30 GT. Sebagian besar kapal-kapal ini juga berpangkalan dan mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Ambon. Tingginya penerbitan PB bagi kapal-kapal di bawah 30 GT disebabkan oleh pendeknya hari operasi kapal-kapal tersebut, di mana lama operasi berkisar antara 5 sampai 14 hari untuk kapal dengan alat tangkap pancing tonda dan handline. Selain itu kapal-kapal pengangkut yang beroperasi di PPN Ambon sebagian besar berukuran di bawah 30 GT dengan hari operasi yang tidak lama (< 7 hari).

Tabel 19. Penerbitan PB berdasarkan alat penangkapan ikan dan ukuran kapal Tahun 2025

Alat Tangkap	Penerbitan PB Berdasarkan Alat Tangkap dan Ukuran Kapal (GT)								Total (Unit)
	10-20 GT	20-30 GT	30-50 GT	50-100 GT	100-200 GT	200-300 GT	300-500 GT	> 500 GT	
Huhate	-	21	-	-	-	-	-	-	21
Jala Jatuh Berkapal	-	18	2	9	1	-	-	-	30
Jaring Hela Udang Berkantong	-	-	-	-	8	10	3	-	21
Pancing Cumi	-	30	1	11	1	-	-	-	43
Pancing Ulur (Tuna)	95	127	-	-	1	-	-	-	223
Pancing Ulur	6	5	-	-	-	-	-	-	11
Pengangkut	2	67	1	37	28	16	12	1	164
Tonda	24	78	-	-	-	-	-	-	102
PCPB - 1 Kapal	-	13	-	-	-	-	-	-	13
PCPK - 1 Kapal	-	27	-	-	-	-	-	-	27
Pukat Labuh	-	-	-	-	6	-	-	-	6
Rawai Tuna	-	14	-	12	-	-	-	-	26
Total (Unit)	127	400	4	69	45	27	15	1	686

Adapun jumlah kapal yang aktif beroperasi dan berpangkalan di PPN Ambon berdasarkan ukuran kapal dan alat tangkap sesuai penerbitan PB pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 20. Jumlah Kapal Aktif dan Berpangkalan di PPN Ambon Tahun 2025

Alat Tangkap	Jumlah Kapal Aktif yang Berpangkalan								Total (Unit)
	10-20 GT	20-30 GT	30-50 GT	50-100 GT	100-200 GT	200-300 GT	300-500 GT	> 500 GT	
Huhate	-	7	-	-	-	-	-	-	7
Jala Jatuh Berkapal	-	12	3	9	1	-	-	-	25
Jaring Hela Udang Berkantong	-	-	-	-	4	21	1	-	26
Jaring Insang Hanyut	-	3	-	-	1	-	1	-	5
Pancing Cumi	-	30	-	10	1	-	-	-	41
Pancing Ulur	3	4	-	-	-	-	-	-	7
Pancing Tonda	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Pancing Ulur Tuna	6	14	-	-	-	-	-	-	20
Pengangkut	1	8	-	4	4	1	5	1	24
PCPB - 1 Kapal	-	1	-	-	-	-	-	-	1
PCPK - 1 Kapal	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Pukat Labuh	-	-	-	-	6	-	-	-	6
Rawai Tuna	-	6	-	4	-	-	-	-	10
Total (Unit)	11	92	3	27	17	22	7	1	180

Dalam hal jumlah kapal aktif dan berpangkalan di PPN Ambon sepanjang tahun 2025, terdapat sebanyak 180 unit yang didominasi oleh kapal-kapal dengan ukuran di

bawah 30 GT sebanyak 103 unit dengan rincian 11 unit kapal berukuran 10-20 GT dan 92 unit berukuran 20-30 GT sisanya sebanyak 77 unit merupakan kapal-kapal dengan ukuran di atas 30 GT.

6.6.2. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK)

Pelaporan kedatangan kapal perikanan dilakukan dengan membawa dan melaporkan logbook melalui akun nahkoda dan pemilik/pengurus kapal. logbook yang telah diverifikasi dan dokumen kapal perikanan kemudian diperiksa keabsahan, keaktifan (masa berlaku) dan kesesuaiannya. Setelah dokumen-dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya akan diterbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK) kapal perikanan. Pelayanan penerbitan STBLKK di PPN Ambon tergambar pada ilustrasi dibawah.



Gambar 11. Alur Pelayanan Penerbitan STBLKK Masuk

Kapal perikanan yang melaporkan kedatangan terdiri dari kapal penangkap dan pengangkut. Bagi kapal penangkap wajib menyampaikan *logbook (elektronik)*, kapal pengangkut melampirkan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), dan bagi kapal pengangkut ikan hidup melampirkan Surat Keterangan Muat Ikan (SKMI). Secara keseluruhan, jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBL kedatangan) kapal perikanan yang diterbitkan pada bulan Januari sd Desember tahun 2025

sebanyak 699 lembar, jika dibandingkan dengan tahun 2024 diperoleh 572 lembar maka terjadi kenaikan sebesar 18,17%. Adapun rekapan penerbitan STBL Kedatangan yang diterbitkan di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 21. Rekapan Penerbitan Stblkk Masuk dan Kunjungan Kapal Berdasarkan API

Bulan	Huhat e	JJB	JHU B	JIH	P. Cumi	P. Tonda	P. Ulur	Penga ngkut	PCPK	Pukat Labuh	Rawa i Tuna	PCP B	Total
Januari	1	6	-	-	10	6	13	20	2	4	3	-	65
Februari	2	-	2	-	-	7	20	8	2	2	-	1	44
Maret	4	16	1	-	13	4	13	16	2	-	-	3	72
April	3	3	3	1	11	4	5	17	2	-	1	2	52
Mei	3	-	1	-	2	5	23	15	5	-	3	1	58
Juni	1	-	2	-	1	5	22	5	4	-	1	1	42
Juli	2	-	4	-	-	6	28	12	2	-	-	1	55
Agustus	1	-	1	2	-	4	31	13	-	-	6	-	58
September	-	-	1	-	1	4	30	14	1	-	1	1	53
Oktober	2	-	19	1	1	5	27	14	2	-	2	2	75
November	2	-	-	-	-	5	32	12	1	-	3	-	55
Desember	1	-	4	1	6	1	35	15	3	-	3	1	70
Total	22	25	38	5	45	56	279	161	26	6	23	13	699

Berdasarkan data kunjungan/kedatangan kapal tahun 2025, diperoleh nilai rata-rata penerbitan STBLKK perbulan sebanyak 58 lembar. Jumlah kunjungan tertinggi sebanyak 75 kapal terjadi pada bulan Oktober 2025. Dari data kapal aktif tahun ini, kapal dengan alat tangkap pancing ulur merupakan jenis kapal yang paling banyak berkunjung di PPN Ambon sebanyak 279 kali kunjungan dengan presentasi sebesar 40%, kemudian diikuti oleh kapal pengangkut dengan jumlah kunjungan sebanyak 161 kali atau sebesar 23%.

6.6.3. Manifest Sampah

Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut merupakan salah satu kebijakan yang mendukung agenda prioritas dari KKP, yang didukung oleh Pelabuhan perikanan Nusantara Ambon sejak tahun 2022. Pengelolaan sampah merupakan salah satu program pencegahan pencemaran lingkungan oleh limbah khususnya plastik di laut karena memiliki rentang waktu penguraian yang sangat lama.

Permasalahan sampah di laut dari hari ke hari semakin tak terbendung. Hal ini menimbulkan dampak kerusakan luar biasa pada kehidupan laut. Selain mengotori lautan, sampah yang termakan dapat menyulitkan bahkan meracuni hewan laut. Selain mengganggu biota laut, sampah plastik juga berdampak pada terganggunya ekologi perairan. Beranjak dari beberapa alasan tersebut, PPN Ambon mengambil langkah untuk memberikan kantong plastik sebagai wadah untuk menampung sampah bagi kapal perikanan yang akan meninggalkan dermaga yang nantinya akan digunakan sebagai wadah penampungan sampah plastik di atas kapal yang akan diserahkan kembali saat tambat. Sampah yang terkumpul selanjutnya akan dibuang ke tempat penampungan oleh petugas kebersihan.



Gambar 12. Penyerahan dan Pengambilan Kantong Plastik di Kapal Perikanan

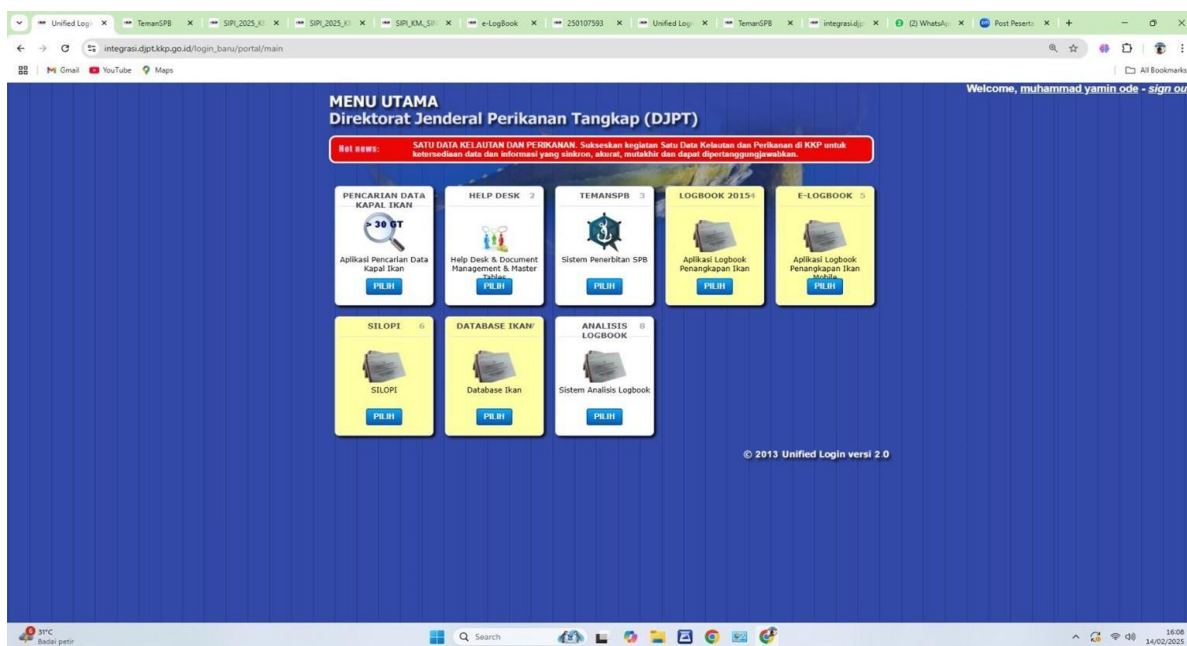
Sampah yang dihasilkan dari aktivitas diatas kapal perikanan digolongkan dalam 2 jenis yakni sampah plastik dan non plastik (organik dan an-organik). Pengumpulan dan penyerahan sampah dilakukan secara terpisah dengan tujuan untuk menghindari pencemaran (terutama sampah plastik) di laut.

Upaya rutin yang dilakukan dalam pencegahan pencemaran ini berupa Pemberian himbauan dan kantong sampah sebelum keberangkatan kapal yang akan digunakan sebagai wadah sampah plastik selama operasional. Sampah ini kemudian akan dikumpulkan dan diteruskan ke pembuangan akhir saat kapal perikanan melaporkan kedatangannya.

6.6.4. Logbook Penangkapan Ikan (LBPI)

Logbook penangkapan ikan merupakan salah satu instrumen pendataan hasil perikanan selain berperan sebagai pendugaan stok ikan (*stock assesment*). Pelaksanaan Logbook Penangkapan Ikan didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan,

Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Logbook sendiri telah mengalami perkembangan system dari manual ke elektronik dengan memanfaatkan gadget berbasis android. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan nelayan/nahkoda dalam mengisi menyimpan dan melaporkan data hasil tangkapannya. Penerapan logbook elektronik dilakukan dengan memanfaatkan system aplikasi induk yang telah ada (SILOPI). Kemudahan ini ditempuh pemerintah guna memberi keleluasaan bagi para nahkoda untuk menginput data hasil tangkapan melalui aplikasi (*paperless*) seperti pada gambar berikut.



Gambar 13. Tampilan aplikasi sistem logbook penangkapan ikan (SILOPI)

Penerapan logbook elektronik (e-logbook) melalui aplikasi SILOPI pada tahun 2025 di PPN Ambon telah berjalan dengan maksimal di mana semua Logbook yang diterima telah terdata pada aplikasi. Semua kapal penangkap yang aktif di PPN Ambon telah melakukan aktivasi logbook elektronik. Aktivasi logbook dilakukan bagi kapal penangkap yang akan beroperasi dan belum memiliki akun. Selain itu bila terjadi kerusakan/kehilangan gawai (HP) maka dapat dilakukan pengaktifan kembali.

Jumlah Logbook yang diterima dan diverifikasi sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025 di PPN Ambon sebanyak 462 Logbook atau meningkat sebanyak 67% dari tahun 2024 (310 logbook) dengan jumlah aktivasi logbook elektronik sebanyak 42 kali pengaktifan. Jumlah verifikasi dan aktivasi logbook selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Jumlah logbook yang diterima Tahun 2025

Bulan	Penerapan e-Logbook (Kapal)	
	Verifikasi	Aktifasi
Januari	34	-
Februari	30	1
Maret	53	-
April	29	2
Mei	36	2
Juni	33	4
Juli	38	5
Agustus	41	2
September	38	3
Oktober	44	8
November	39	13
Desember	47	2
Total	462	42

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon mengimplementasikan Logbook penangkapan ikan melalui aktivasi dan verifikasi yang dibarengi dengan himbauan kepada para nahkoda dan pemilik kapal perikanan untuk senantiasa mengisi dan melaporkan hasil tangkapannya secara teratur.

6.6.5. Lembar Awal (LA) dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) – LT/LTS

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon merupakan salah satu pelabuhan yang diberikan kewenangan dalam menerbitkan Lembar Awal (LA) dan SHTI (LT/LTS) atau yang disebut sebagai Otoritas Kompeten Lokal (OKL).

Dalam perkembangannya, Lembar Awal mengalami perubahan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dari dokumen penunjang kegiatan ekspor menjadi dokumen pendaratan yang mesti dimiliki oleh kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan. Perubahan ini menjadikan semua hasil tangkapan yang didaratkan harus dibekali dengan Lembar Awal. Dengan demikian, hasil tangkapan tersebut dapat terlindungi dari unsur penangkapan ilegal atau IUU fishing.

Jumlah Lembar Awal (LA) yang diterbitkan PPN Ambon selama tahun 2025 sebanyak 1.450 lembar, jumlah ini mengalami peningkatan yang tajam jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 853 lembar atau sebesar 58%.

Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan tuna (loin) dari nelayan-nelayan pancing tuna (hand line) yang tersebar di kota Ambon dan sekitarnya.

Peningkatan permintaan akan tuna loin muncul karena aktifitas ekspor langsung dari Ambon ke Vietnam oleh beberapa perusahaan perikanan yang ada di Pulau Ambon. Tuna yang diekspor negeri, harus didukung oleh dokumen ekspor Lembar Turunan Sederhana (LTS). Jumlah penerbitan Lembar awal dan SHTI di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Jumlah Lembar Awal (LA) SHTI yang Diterbitkan

No.	Bulan	LA (Lbr)	SHTI LTS (Lbr)
1	Januari	32	1
2	Februari	159	2
3	Maret	149	6
4	April	150	1
5	Mei	40	2
6	Juni	127	2
7	Juli	108	2
8	Agustus	70	3
9	September	146	1
10	Oktober	265	-
11	November	70	3
12	Desember	134	-
Jumlah		1.450	23

Tahun 2024, merupakan tahun pertama bagi PPN Ambon dalam menerbitkan Lembar Turunan Sederhana. Permintaan dokumen ini diterima PPN Ambon sejak bulan Mei dan berlangsung terus hingga Desember 2024. Dalam kurun waktu 8 bulan, PPN Ambon telah menerbitkan 23 dokumen LTS untuk pengiriman ke luar negeri secara langsung.

6.7. Pelayanan Perbekalan

6.7.1. Perbekalan Es

Untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan dan menjaga mutu hasil tangkapan nelayan, pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon kembali mengaktifkan operasional pabrik es yang sempat terhenti akibat kerusakan. Produksi es dimulai pada bulan maret tahun 2024 hingga 28 Februari tahun 2025, dengan total penyaluran es sebanyak **7.451** balok atau **223.530** kg. Hasil produksi ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan es kapal perikanan, tetapi juga

didistribusikan ke pasar ikan guna menjaga kualitas hasil perikanan. Setelah itu pabrik es kembali Vakum disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 yang bertujuan menargetkan penghematan belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini berakibat pada berkurangnya anggaran untuk pembayaran listrik yang akhirnya berdampak pada operasional pabrik es milik PPN Ambon.

Selain dari pabrik es milik Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, kebutuhan es untuk kapal-kapal yang beroperasi di PPN Ambon juga dipasok oleh perusahaan-perusahaan yang beraktifitas di kawasan pelabuhan yaitu Fa Sanu dengan kapasitas 5 ton/ hari, PT. Asmin Jumahir Sejahtera dengan kapasitas 5 ton/hari, milik PT. Harta Samudera dengan kapasitas 5 ton/ hari, dan juga bersumber dari pemasok yang berada di luar kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Rincian data penyaluran es pada tahun 2025 tersaji pada tabel berikut:

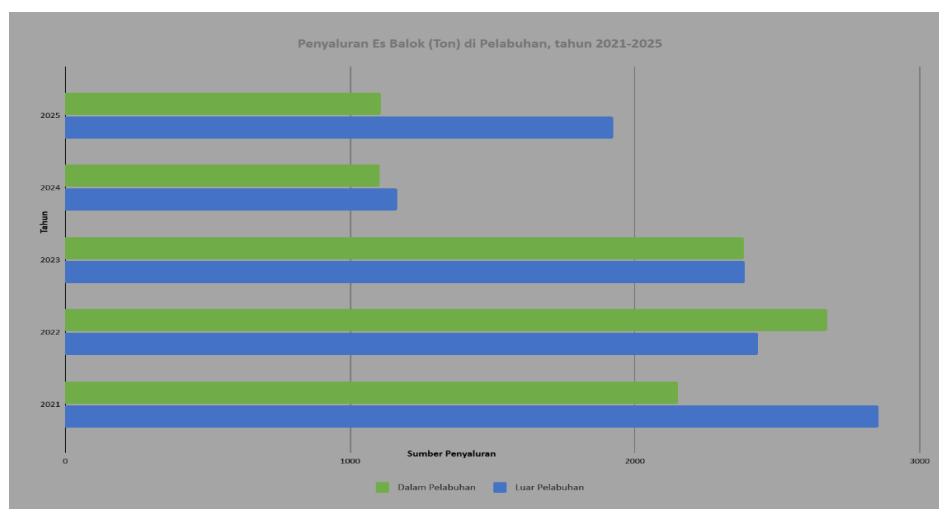
Tabel 24. Volume penyaluran es Tahun 2025

No	Bulan	Volume Penyaluran Es (kg)		
		Dari dalam pelabuhan	Dari luar pelabuhan	Jumlah penyaluran
1	Januari	100.380	25.800	126.180
2	Februari	93.900	285.870	379.770
3	Maret	86.250	231.930	318.180
4	April	115.500	2269.490	384.990
5	Mei	110.550	367.200	477.750
6	Juni	97.350	10.080	107.430
7	Juli	87.450	14.250	101.700
8	Agustus	72.750	191.910	264.660
9	September	85.800	114.870	200.670
10	Oktober	93.000	178.740	271.740
11	November	82.500	174.510	257.010
12	Desember	81.750	59.400	141.150
Jumlah		1.107.180	1.924.050	3.031.230

Volume penyaluran es ke kapal perikanan selama tahun 2025 tercatat sebesar 3.031 ton, mengalami kenaikan sebesar 25,07% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2.271 ton. Penyaluran es tersebut terdiri atas:

- Penyaluran dari dalam pelabuhan, yang bersumber dari pabrik es baik milik PPN Ambon maupun perusahaan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan, dengan total penyaluran sebesar 1.107 ton (48,63%).
- Penyaluran dari luar pelabuhan, yang berasal dari pemasok es di luar kawasan pelabuhan, dengan total penyaluran sebesar 1.924 ton (51,37%).

Selama periode 2021–2025, volume penyaluran es mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Gambar 14. Grafik Penyaluran Es di PPN Ambon Tahun 2021-2025

6.7.2. Penyaluran BBM

Dalam proses penyaluran BBM ke kapal-kapal perikanan maupun kapal non-perikanan yang berkunjung di PPN Ambon, tersedia satu unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan pelabuhan. Volume penyaluran BBM di PPN Ambon pada tahun 2024 Bulan Januari sd Agustus 2025 yang berasal dari SPBN tersebut tercatat sebesar 69.404 liter untuk *Dexlite* dan 1.005.878 liter untuk *Solar*.

Selain dari SPBN di kawasan PPN Ambon, penyaluran BBM juga berasal dari luar kawasan pelabuhan dengan volume mencapai 2.836.377 liter, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

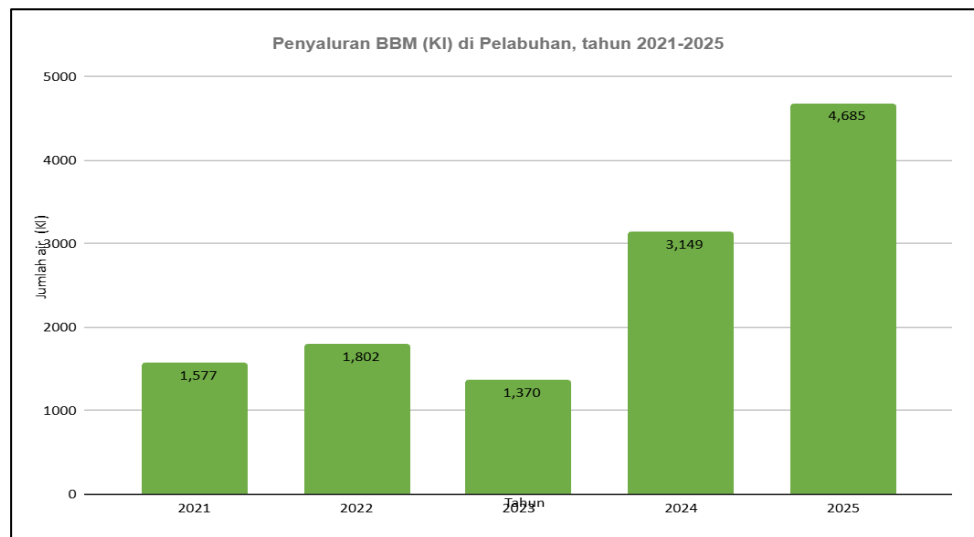
Tabel 25. Volume penyaluran BBM Tahun 2025

No	Bulan	Volume Penyaluran BBM (Liter)				
		Dari dalam pelabuhan		Dari luar pelabuhan		Jumlah penyaluran
		Subsidi	Non Subsidi	Subsidi	Non Subsidi	
1	Januari	30.964	28.896	-	101.724	161.584
2	Februari	26.919	26.306	-	187.308	240.533
3	Maret	68.337	64.684	-	84.546	217.567
4	April	53.916	53.916	-	190.957	298.789
5	Mei	249.577	249.577	-	58.589	557.743
6	Juni	256.121	256.181	-	123.093	635.395
7	Juli	285.904	-	-	440.279	726.183
8	Agustus	103.544	94.306	-	399.406	597.256
9	September	-	-	-	427.530	427.530
10	Oktober	-	-	-	231.800	231.800
11	November	-	-	-	427.530	427.530
12	Desember	-	-	-	163.575	163.575
Jumlah		1.075.282	773.866	0	2.836.377	4.685.475

Volume penyaluran BBM ke kapal perikanan selama tahun 2025 tercatat sebesar 4.685 kiloliter, mengalami kenaikan sebesar 32,78% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 3.149 kiloliter. Penyaluran BBM tersebut terdiri atas:

- a. Penyaluran dari dalam pelabuhan, yang bersumber dari SPBN, dengan total penyaluran sebesar 1.075.282 liter (34,91%), yang terdiri dari:
 - BBM subsidi sebesar 69.404 liter (89,63%)
 - BBM non subsidi sebesar 1005.878 liter (10,37%)
- b. Penyaluran dari luar pelabuhan, yang berasal dari luar kawasan pelabuhan, dengan total penyaluran sebesar 2.836.377 liter (65,09%)

Selama periode 2021-2025, volume penyaluran BBM mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Gambar 15. Grafik Penyaluran BBM di PPN Ambon Tahun 2021-2025

6.7.3. Penyaluran Air Bersih

Penyaluran air bersih di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon bersumber dari dua jalur, yaitu instalasi air bersih milik PPN Ambon dan mobil tanki air bersih yang berasal dari luar pelabuhan untuk disalurkan ke kapal-kapal.

Pada tahun 2025, penyaluran air bersih melalui instalasi PPN Ambon mencapai 1.613.680 liter, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan, unit pengolahan ikan, serta warung-warung yang beroperasi di kawasan pelabuhan. Rincian data penyaluran air bersih tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah.

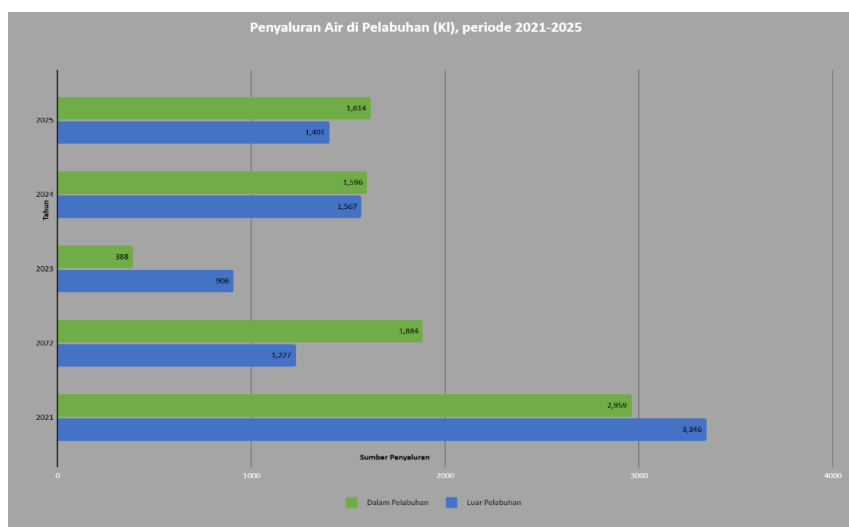
Tabel 26. Volume penyaluran air bersih ke kapal Tahun 2025

No	Bulan	Volume Penyaluran Air (Liter)		
		Dari dalam pelabuhan	Dari luar pelabuhan	Jumlah Penyaluran
1	Januari	52.000	152.850	204.850
2	Februari	89.000	190.400	279.400
3	Maret	89.000	122.760	211.760
4	April	98.000	175.500	273.500
5	Mei	72.000	175.700	247.700
6	Juni	103.000	147.950	250.950
7	Juli	188.000	194.050	382.050
8	Agustus	317.680	97.150	414.830
9	September	215.000	109.600	324.600
10	Oktober	215.000	22.800	237.800
11	November	175.000	12.395	187.395
12	Desember	52.000	152.850	204.850
Jumlah		1.613.680	1.401.155	3.014.835

Volume penyaluran air bersih selama tahun 2025 tercatat sebesar 3.015 kiloliter, mengalami penurunan sebesar -4,91% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 3.163 kiloliter. Penyaluran air bersih tersebut terdiri atas :

- Penyaluran dari dalam pelabuhan, yang bersumber dari instalasi air bersih milik PPN Ambon, dengan total penyaluran sebesar 1.614 kiloliter (50,46%).
- Penyaluran dari luar pelabuhan, yang berasal dari pasokan air melalui mobil tanki, dengan total penyaluran sebesar 1.401 kiloliter (49,54%).

Selama periode 2021–2025, volume penyaluran air bersih mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Gambar 16. Grafik Penyaluran Air Bersih di PPN Ambon Tahun 2021-2025

6.8. Sarana dan Prasarana Pelabuhan

Sarana dan prasarana yang juga dikenal sebagai fasilitas pelabuhan perikanan, menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, khususnya pada Pasal 4, menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari :
 - a. Fasilitas Pokok;
 - b. Fasilitas Fungsional; dan
 - c. Fasilitas Penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas:
 - a. Penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan groin;
 - b. Dermaga;
 - c. Jetty;
 - d. Kolam Pelabuhan;
 - e. Alur pelayaran;
 - f. Jalan komplek dan drainase; dan
 - g. Lahan.
- (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:
 - a. Tempat Pemasaran Ikan (TPI);
 - b. Menara Navigasi (Suar);
 - c. Fasilitas Air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi Listrik;
 - d. Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jarring;
 - e. Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
 - f. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
 - g. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan;
 - h. Kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
 - i. Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas:

- a. Balai pertemuan nelayan;
- b. Mess operator;
- c. *Guest house*;
- d. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK;
- e. Pertokoan; dan
- f. Pos jaga.

Fasilitas Pokok merupakan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi kepelabuhanan diantaranya sebagai tempat kegiatan berlabuh dan bertambat kapal perikanan. Fasilitas pokok juga dapat berfungsi untuk meminimalisir gangguan alam (pemecah gelombang) dan fungsi keselamatan pelayaran (alur pelayaran keluar masuk pelabuhan). Adapun fasilitas pokok di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 27. Fasilitas pokok di PPN Ambon

No	Nama Fasilitas	Ukuran				Kondisi
		Panjang (m)	Lebar (m)	LWS (m)	Luas (m ²)	
1	Areal pelabuhan	0			35.000	Baik
2	Kolam Pelabuhan			>8	486.000	Baik
3	Dermaga	494	8			Baik
4	<i>Reveatment</i>	595				Baik
5	Groin					Baik
6	Jalan Kompleks		5 - 6		4.921	Baik
7	<i>Drainase</i>				1.317	Baik

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional Pelabuhan perikanan. Adapun fasilitas fungsional di PPN Ambon tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 28. Fasilitas fungsional di PPN Ambon

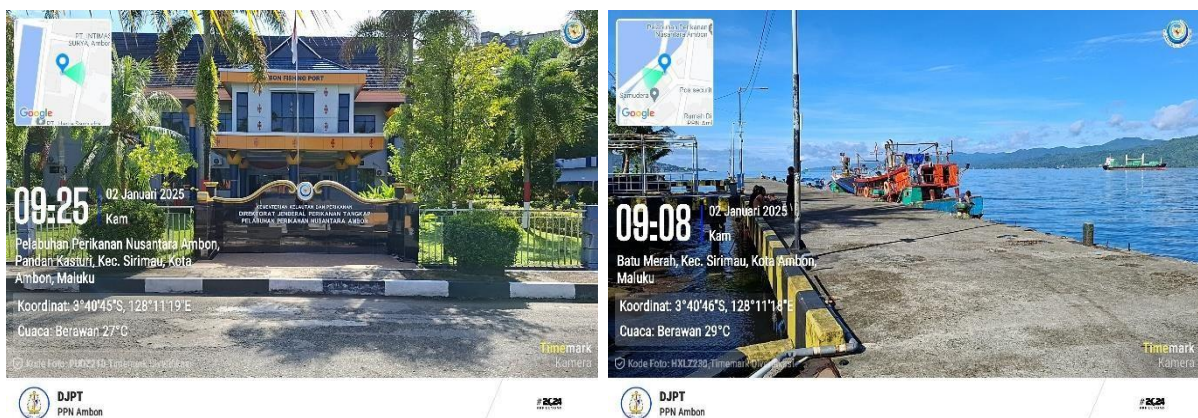
No	Nama Fasilitas	Luas (m ²)	Volume	Keterangan	Kondisi
1	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	527			Tidak berjalan
2	Menara Navigasi (Suar)		1	Lampu	Baik
			1	Menara suar	Baik
3	Komunikasi		1	Telepon	Baik
4	Fasilitas dan Instalasi Air		2	Sumur Artesis	Baik, namun debit air terbatas
			1	Sumur Bor	Baik
5	Instalasi BBM (kapasitas)		500	Ton	Rusak berat
6	Pabrik es		10	Ton/hari	Baik
7	Tower air		2	tower	Baik
8	Instalasi Listrik (kapasitas)	150	105	Kva	Baik
9	Generator set/ Genset		200	Kva	Baik
			175	Kva	Rusak Berat
10	Slipway	33			Rusak Berat
11	ABF (kapasitas)		20	Ton	Rusak Berat
	Cold Storage (kapasitas)		100	Ton	Rusak Ringan
12	Kantor Administrasi Pelabuhan	903			Baik
13	Kantor Syahbandar	117			Baik
14	Pagar Kawasan	1.302			
15	Forklift		1	Unit	Baik
16	Kendaraan Truk dan Minibus		1	Unit	Baik

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di Pelabuhan Perikanan. Secara tidak langsung, fasilitas penunjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan memberikan kemudahan/kelancaran dalam melaksanakan kegiatan aktivitas usahanya di Pelabuhan perikanan. Adapun fasilitas penunjang di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah.

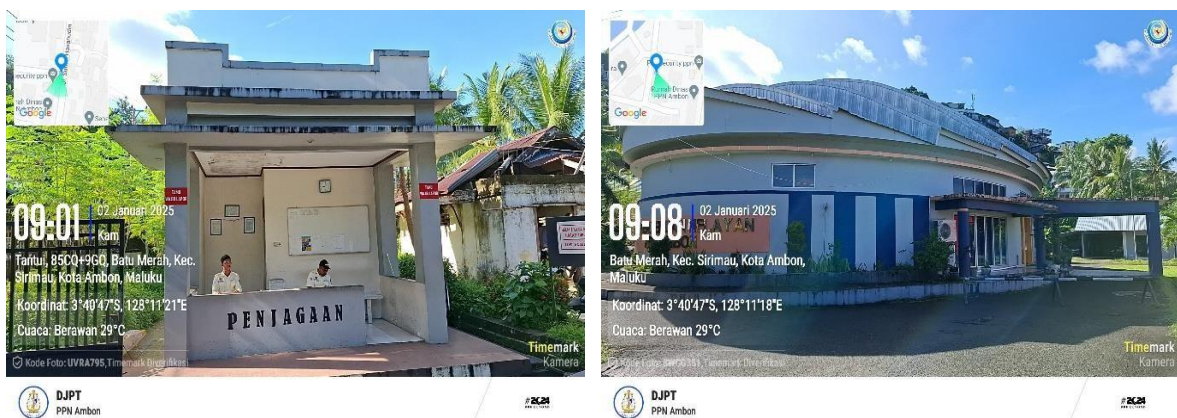
Tabel 29. Fasilitas penunjang di PPN Ambon

No	Nama Fasilitas	Luas (m ²)	Volume	Kondisi
1	Balai Pertemuan Nelayan	1.257	1 Unit	Baik
2	Gedung Pelayanan Terpadu	300	1 Unit	Baik
3	Bangsai Pengolahan	79	1 Unit	Baik
4	Gedung K3	24	1 Unit	Baik
5	Rumah Dinas	906	13 Unit	Baik
6	Mess operator	19	2 Unit	Baik
7	Guest House	137	1 Unit	Baik
8	WC Umum	37	1 Unit	Rusak Berat

No	Nama Fasilitas	Luas (m ²)	Volume	Kondisi
9	Garasi	40 29 91 22	4 Unit	Rusak ringan
10	Pos jaga	42 19	2 Unit	Rusak ringan
11	Gudang arsip	64	1 Unit	Baik
12	Masjid	427	1 Unit	Baik
13	Kendaraan Dinas Operasional			
	- Roda 2		4 Unit 7 Unit	Rusak Ringan Baik
	- Roda 3		2 Unit	Baik Rusak Berat
	- Roda 4		2 Unit	Rusak Ringan
14	Kendaraan Fungsional		4 Unit 1 Unit	Rusak Ringan Rusak Berat
15	Gudang Barang Rusak Berat (Bangunan Tertutup Permanen)		1 Unit	Baik



Gambar 17. Gedung Perkantoran Adminitrasi dan Dermaga PPN Ambon



Gambar 18. Balai Pertemuan Nelayan dan Pos Jaga Keamanan

6.9. Penggunaan Lahan dan Fasilitas Pelabuhan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Ambon memiliki lahan industri seluas 35.308 m² yang telah dimanfaatkan dengan skema penggunaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021. Namun, terjadi perubahan skema pemanfaatan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.3521/DJPT.1/HK.410/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang menginstruksikan pelaksanaan pemanfaatan BMN menggunakan **cara sewa** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pada tahun 2025, terdapat 12 (duabelas) permohonan perpanjangan perjanjian dan 2 (dua) permohonan baru. Perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 2025 berjumlah 8 (delapan).

Hingga akhir tahun 2025, dari total luas lahan industri seluas 35.308 m², telah dimanfaatkan 35.068 m² atau 99,32%, yang terdiri atas penggunaan untuk bangunan pabrik es, unit pengolahan, kios, sewa lahan perbankan, dan koperasi. Adapun rincian penggunaan lahan di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 30. Penggunaan lahan PPN Ambon Tahun 2025

No	Nama Barang	Luasan objek perjanjian (m2)		Luas yang digunakan (m2)	Keterangan penggunaan
		Tanah	Bangunan		
1	Fa. Sanu	1200	-	1200	Penggunaan Tanah Industri
2	PT. Tri Satria Samudra 01	1200	-	1200	Penggunaan Tanah Industri
3	PT. Tri Satria Samudra 02	400	-	400	Penggunaan Tanah /Bangunan Industri
4	PT. Sumber Laut Utama	700	-	700	Penggunaan Tanah Industri
5	PT. Samudera Pratama Jaya	160	-	160	Penggunaan Tanah Industri
6	PT. Intimas Surya	1600	-	1600	Penggunaan Tanah Industri
7	PT. Jaring Mas	2116	-	2116	Pemanfaatan Lahan/Bangunan Industri
8	CV. Advani Bintang Samudera	495	-	495	Penggunaan Tanah Industri
9	CV. Arbil	400	-	400	Penggunaan Tanah Industri
10	CV. Maluku Fortuna	300	-	300	Penggunaan Tanah Industri
11	Oei Eng San	400	-	400	Penggunaan Tanah Industri
12	PT. Mina Usaha Harapan	800	-	800	Penggunaan Tanah Industri
13	PT. Harta Samudra I	2500	-	2500	Penggunaan Tanah Industri
14	PT. Harta Samudra II	1200	-	1200	Penggunaan Tanah Industri
15	PT. Harta Samudra III	1617	-	1617	Penggunaan Tanah Industri
16	CV. Tuna Maluku	800	-	800	Penggunaan Tanah Industri
17	PT. Karya Laut Sejahtera	663	-	663	Penggunaan Tanah Industri

No	Nama Barang	Luasan objek perjanjian (m2)		Luas yang digunakan (m2)	Keterangan penggunaan
		Tanah	Bangunan		
18	PT. Sinar Abadi Cemerlang Semarang	752	-	752	Penggunaan Tanah Industri
19	PT. Ambon Fishery Industries	815	-	815	Penggunaan Tanah
20	KPT. Mina Sejahtera	752	-	752	Penggunaan Tanah Industri
21	PT. Bank Tabungan Negara	8	8	16	Penggunaan Tanah dan Bangunan
22	CV. Harta Laut Cemerlang	139	130	269	Penggunaan Tanah dan Bangunan
23	PT. Asmin Jumahir Sejahtera	74	668	742	Penggunaan Tanah dan Bangunan
24	PT. Tritunggal Lintas Benua	175	385	560	Penggunaan Tanah dan Bangunan

Investasi di pelabuhan perikanan berasal dari instansi pemerintah maupun pihak swasta. Investasi dapat berupa modal tetap/tidak bergerak seperti bangunan, dan modal bergerak seperti biaya produksi.

Tabel 31. Investasi di kawasan PPN Ambon

No.	Nama Pengguna (Badan Usaha/Perorangan/Instansi)	Jenis Usaha	Nilai Investasi (Rp)
1	Fa. Sanu	Tempat Pengolahan Ikan, Pabrik Es dan <i>Cold Storage</i>	3.000.000.000
2	PT. Tri Satria Samudra 01	Pengumpulan dan Pemasaran Ikan, Perbengkelan	11.000.000.000
3	PT. Tri Satria Samudra 02	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	150.000.000
4	PT. Sumber Laut Utama	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	9.000.000.000
5	PT. Samudera Pratama Jaya	Jasa Perbengkelan	400.000.000
6	PT. Inti Mas Surya	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5.500.000.000
7	PT. Jaring Mas	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan dan Gudang	15.000.000.000
8	CV. Adfani Bintang Samudera	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	2.150.000.000
9	CV. Arbil	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	3.000.000.000
10	CV. Maluku Fortuna	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	2.000.000.000
11	Oei Eng San	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan serta Produksi dan Penyaluran Es	2.500.000.000
12	PT. Mina Usaha Harapan	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	4.025.000.000

No.	Nama Pengguna (Badan Usaha/Perorangan/Instansi)	Jenis Usaha	Nilai Investasi (Rp)
13	PT. Harta Samudra 01	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	23.900.000.000
14	PT. Harta Samudra 02	Ruang processing, Gudang ikan, pabrik es	7.000.000.000
15	PT. Harta Samudra	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan dan kantor	3.500.000.000
16	CV. Tuna Maluku	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	4.000.000.000
17	PT. Karya Laut Sejahtera	Penyaluran BBM	3.500.000.000
18	PT. Sinar Abadi Cemerlang Semarang	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	2.500.000.000
19	Fatma Kamah	Kafetaria	700.000.000
20	KPT. Mina Sejahtera	penjualan sembako (kios sembako)	645.000.000
21	PT. Bank Tabungan Negara	Jasa Keuangan (ATM)	50.000.000
22	CV. Harta Laut Cemerlang	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	1.500.000.000
23	PT. Asmin Jumahir Sejahtera	Unit Pengolahan Ikan dan Pabrik Es	4.100.000.000
24	CV. Dian Samudra	Cold Storage dan Air Blast Freezer	2.500.000.000
25	Kios Ibu Tini Maka	Warung Makan	20.000.000
26	Kios Rani	Toko Kelontong	20.000.000
27	Kios Indah Maros	Toko Kelontong	20.000.000
28	Warung Buah	Toko Kelontong	20.000.000
29	Kios Air Isi Ulang	Toko Kelontong	20.000.000
30	Warung Coto Makasar	Warung Makan	20.000.000
31	Warung Pak Karim	Warung Makan	20.000.000
32	Warung Mama Ris	Warung Makan	10.000.000
33	Warung Sari Nurlita	Warung Makan	20.000.000
Total			111.790.000.000

Peredaran uang di kawasan PPN Ambon pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp163.572.238.727, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp123.932.295.215, yang menunjukkan kenaikan sebesar Rp39.639.943.512, atau meningkat 63,19% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan aktifitas kapal yang berdampak pada naiknya penyaluran BBM, penyaluran air bersih, tenaga kerja (nelayan), dan terutama nilai produksi ikan. Adapun rincian jumlah uang beredar di kawasan PPN Ambon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32. Peredaran uang di PPN Ambon Tahun 2025

No	Indikator	Peredaran Uang (Rp)
1	Penyaluran BBM	33.101.388.510
2	Penyaluran Air Bersih	172.443.000
3	Penyaluran Es	1.022.706.906
4	Jasa Angkutan	20.000.000
5	Jasa Bongkar Muat	
6	Warung Pujasera	28.000.000
7	Keamanan	
8	Pengelola TPI	
9	Pedagang Ikan	
10	Tenaga Kerja (Nelayan)	21.319.845.000
11	Nilai Produksi Ikan	100.805.227.460
12	Pengolahan Produk Beku	2.041.200.000
13	PNBP	3.621.177.144
14	KPT Mina Sejahtera	1.440.250.707
Jumlah		163.572.238.727

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai peredaran uang di PPN Ambon mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Peredaran uang di PPN Ambon Tahun 2021 - 2025

No	Tahun	Peredaran Uang (Rp1.000,-)	Per bulan (Rp)	Per hari (Rp)
1	2021	97.722.196	7.087.231	228.620
2	2022	134.193.463	11.182.786	367.653
3	2023	75.943.033	6.328.586	204.148
4	2024	123.932.295	10.327.691	344.256
5	2025	163.572.238	13.631.019	37.345
Jumlah		595.363.225	48.557.313	1.182.022

6.10. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA

Landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan penarikan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di PPN Ambon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pungutan PNBP yang telah dilaksanakan di PPN Ambon tahun 2025 yaitu:

1. Pelayanan jasa pas masuk;
2. Pelayanan tambat labuh kapal;
3. Pelayanan jasa kebersihan pelabuhan;
4. Pelayanan jasa pengadaan es;
5. Pelayanan jasa penggunaan *Freezer* dan *Cold Storage*;

6. Pelayanan jasa listrik;
7. Pelayanan jasa penggunaan kendaraan dan;
8. Pelayanan jasa sewa tanah dan bangunan.

Adapun data hasil pelaksanaan pungutan PNBPN selama tahun 2025 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34. Hasil pungutan PNBPN Tahun 2025

No	Jenis Penerimaan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
		Target	Capaian
I	PENERIMAAN UMUM		
	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		607.148.910
	Pemanfaatan Rumah Negara		33.840.730
	Penerimaan kembali belanja Pegawai tahun Anggaran yang lalu		1.077.200
	Pendapatan Lainnya		-
	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		57.765.800
	Jumlah Penerimaan Umum		699.832.640
II	PENERIMAAN FUNGSIONAL		
a	Pelabuhan Perikanan		
	<i>Tambat Kapal Perikanan</i>		
	Kapal >100 GT	12.000.000	330.178.860
	Kapal >30 GT - 100 GT	15.000.000	186.357.040
	Kapal >5 GT - 30 GT	60.000.000	689.924.275
	Kapal Asing	6.500.000	4.469.050
	<i>Labuh Kapal Perikanan</i>		-
	Kapal >100 GT		-
	Kapal >30 GT - 100 GT		-
	Kapal >5 GT - 30 GT		-
	<i>Tambat/Labuh Kapal Non Perikanan</i>		-
	Kapal Non Perikanan Penunjang Kapal Perikanan		-
	Kapal Non Perikanan Non Penunjang Kapal Perikanan	195.000.000	300.701.500
	<i>Jasa Pengadaan air</i>		-
	Pengadaan air	51.640.000	111.373.200
	<i>Jasa Pas Masuk</i>		-
	Kendaraan Golongan I (R2/R3)	61.350.000	188.671.600
	Kendaraan Golongan II (R4)	48.150.000	118.279.800
	Kendaraan Golongan III (R6)	16.910.000	45.463.000
	Kendaraan Golongan IV (R10)	-	6.615.000
	Kendaraan Golongan V (>R10)		20.000

No	Jenis Penerimaan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
		Target	Capaian
	<i>Jasa Kebersihan Pelabuhan</i>		-
	Bangunan Permanen Tertutup	41.000.000	41.681.160
	Perkantoran/pertokoan		-
	Rumah Makan/Kios	9.500.000	6.159.000
	Kapal Perikanan >5 GT	11.0000.000	114.500.300
	Kapal Non Perikanan	20.000.000	30.070.150
b	Penggunaan Sarana dan Prasarana		-
	<i>Jasa Penggunan Tanah dan Bangunan</i>		-
	Pengembangan (Development Charge)	385.979.000	239.943.897
	Pemeliharaan Prasarana	45.000.000	35.632.055
	Tempat Penumpukan Barang	-	4.456.000
	Bangunan Permanen	8.100.000	17.362.501
	Mess	560.000	400.000
	Ruang Rapat	-	2.000.000
	Gedung Pertemuan	-	-
	<i>Jasa Penggunaan Peralatan dan Mesin</i>		-
	Pengadaan Es	141.500.000	103.642.170
	Pembekuan (freezer)	40.020.000	-
	Gudang Beku (Cold Storage)	190.500.000	-
	Penggunaan Keranjang Plastik		124.000
	<i>Jasa Penggunaan Kendaraan</i>		-
	Fork Lift	1.500.000	250.000
	dump truck		1.800.000
	Truck Boks		-
	Thermoking 4 Roda		350.000
c	Pelabuhan Perikanan (Batang Tubuh)		-
	<i>Listrik</i>		-
	Pemakaian Listrik	10.339.000	10.603.519
	Total Penerimaan Umum dan Fungsional	1.411.016.000	3.315.769.717
	Persentase Capaian		234%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui realisasi PNPB pada tahun 2025 mencapai **Rp3.315.769.717**, dengan persentase realisasi sebesar **234 %** dari target yang ditetapkan, yaitu **Rp1.411.016.000**. Terjadi kenaikan realisasi dibandingkan dengan tahun 2024, di mana PNPB Non SDA mencapai **128%** dari target Rp1.118.233.000, dengan realisasi sebesar Rp1.432.746.332.

Kenaikan ini salah satunya dipengaruhi oleh terbitnya Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.3521/DJPT.1/HK.410/VII/2024, yang mengatur perubahan skema penggunaan tanah dan bangunan. Semula,

pengenaan tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, kemudian diubah menjadi skema pemanfaatan dengan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dimana nilai sewa bmn berupa tanah dan /atau bangunan menjadi lebih besar. Adapun rincian realisasi PNPB per bulan selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35. Realisasi PNPB per bulan Tahun 2025

No	Bulan	Penerimaan		Realisasi Perbulan (Rp)	Realisasi s/d Bulan (Rp)	Capaian (%)
		Fungsional (Rp)	Umum (Rp)			
1	Januari	158.192.766	2.996.636	161.189.402	161.189.402	11,42
2	Februari	224.593.367	3.419.436	228.012.803	383.202.205	27,58
3	Maret	192.576.419	2.752.831	195.329.250	584.531.455	41,53
4	April	280.573.305	2.752.831	283.326.136	837.857.591	61,51
5	Mei	168.631.601	2.752.831	171.384.432	1.039.242.023	73,65
6	Juni	139.849.876	2.752.831	142.602.707	1.181.844.730	83,76
7	Juli	174.739.950	262.127.867	436.867.817	1.618.712.547	114,72
8	Agustus	180.135.251	16.042.217	196.177.468	1.814.844.730	128,62
9	September	285.038.236	238.699.976	523.738.212	2.338.628.227	165,74
10	Oktober	287.212.887	100.094.110	387.306.997	2.725.935.224	193,19
11	November	248.419.332	2.595.006	251.014.338	2.976.949.562	210,98
12	Desember	275.974.087	62.846.068	338.820.155	3.315.769.717	234,99
Total		2.615.937.077	699.832.640	3.315.769.717	19.014.752.698	234,99

6.6. Penyerapan Tenaga Kerja

Keberadaan PPN Ambon di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon diharapkan dapat memberikan efek ganda (*multifier effects*) terhadap pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah ini, baik dalam kegiatan ekonomi yang bersifat agrobisnis perikanan maupun kegiatan dibidang usaha lainnya sehingga dapat menambah lapangan kerja dan membuka kesempatan berusaha.

Tenaga kerja di PPN Ambon melibatkan seluruh nelayan (ABK) kapal perikanan, karyawan perusahaan perikanan, serta pekerja perorangan yang bergerak di bidang pengolahan, pengumpulan, pemasaran, dan pelayanan jasa yang memanfaatkan lahan pelabuhan sebagai lokasi usaha. Selain itu, tenaga kerja juga mencakup pegawai instansi pemerintah, baik pegawai PPN Ambon maupun instansi terkait lainnya yang berada di lingkungan pelabuhan. Rincian tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36. Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
I	Nelayan	7.629
II	Non Nelayan	3.299
	Tukang dan buruh	9
	Pegawai perusahaan dan instansi terkait	2.540
	Pegawai Pelabuhan	74
	Lainnya	750
Jumlah (Orang)		14.301

Penyerapan tenaga kerja di PPN Ambon selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2023, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 19.746 orang, sedangkan penyerapan terendah terjadi pada tahun 2025, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 14.301 orang. Dibandingkan dengan tahun 2024, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,98%. Adapun rincian penyerapan tenaga kerja selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

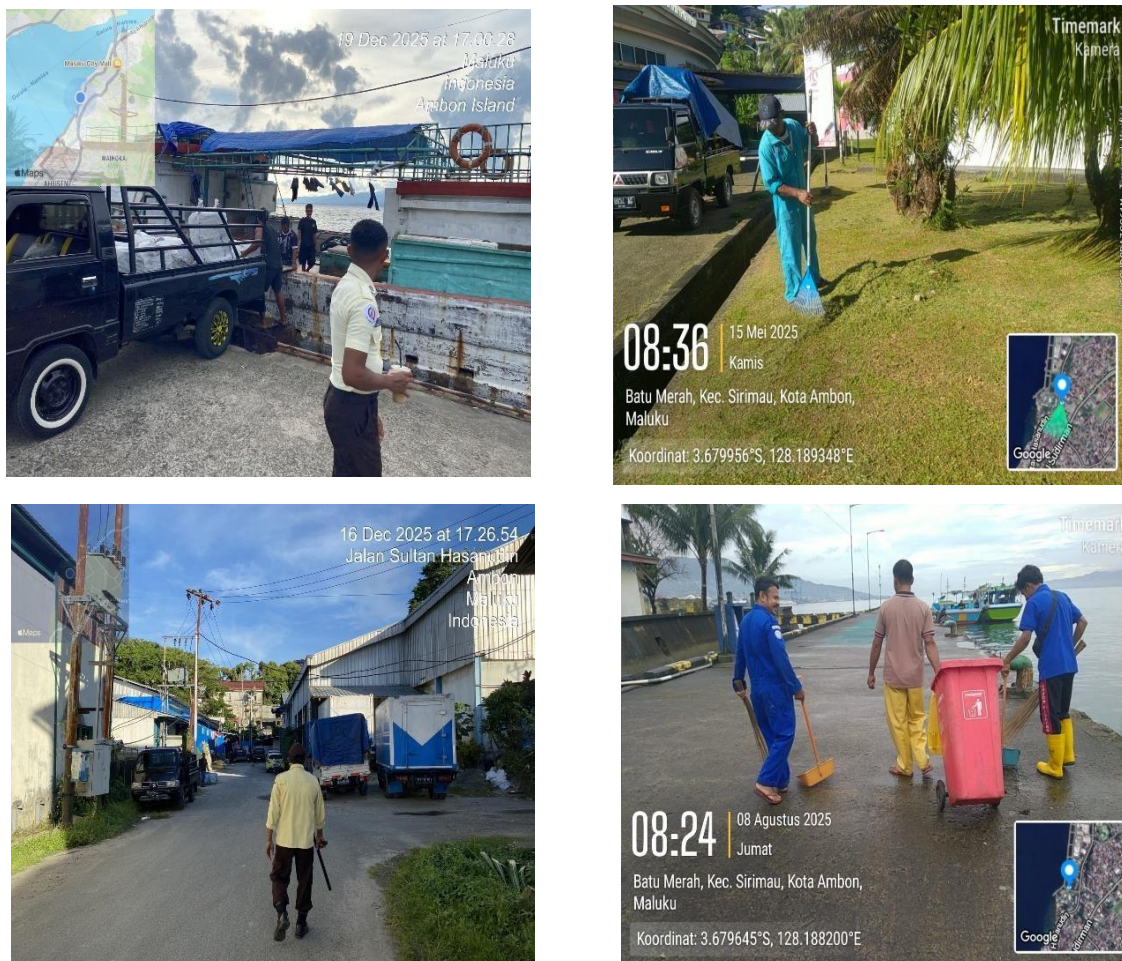
Tabel 37. Penyerapan Tenaga Kerja Periode Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	Jumlah	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nelayan (Fisherman)	29.081	4.593	5.572	4.756	6.531	7.629
2	Non Nelayan (Non Fisherman)	26.723	6.046	5.853	7.495	4.030	3.299
	Tukang dan buruh (Labor)	4.843	1.420	1.640	1.094	680	9
	Pegawai perusahaan dan instansi terkait (Ltd, etc)	16.997	2.353	3.784	5.920	2.400	2.540
	Pegawai pelabuhan (Official)	424	83	83	82	102	74
	Lainnya (Others)	4.533	2.190	346	399	848	750
Jumlah		82.601	16.685	17.278	19.746	14.591	14.301

6.7. Kegiatan K-5 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Kerja)

K5 adalah standar penerapan pola hidup tertib dan lingkungan yang terawat, Pelaksanaan kegiatan K-5 di PPN Ambon merupakan faktor yang turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan di pelabuhan perikanan tersebut. Dengan kondisi lingkungan pelabuhan perikanan yang terpelihara oleh kondisi K-5 nya dengan baik,

suasana kondusif dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang beraktivitas di PPN Ambon.



Gambar 19. Pelaksanaan Kegiatan K-5 di PPN Ambon

Oleh sebab itu, PPN Ambon senantiasa memperhatikan kondisi kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan keselamatan kerja (K-5) di dalam areal pelabuhan. Selain menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan keselamatan kerja (K-5) di kawasan pelabuhan, PPN Ambon juga menghimbau dan mengumpulkan sampah dari kapal yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

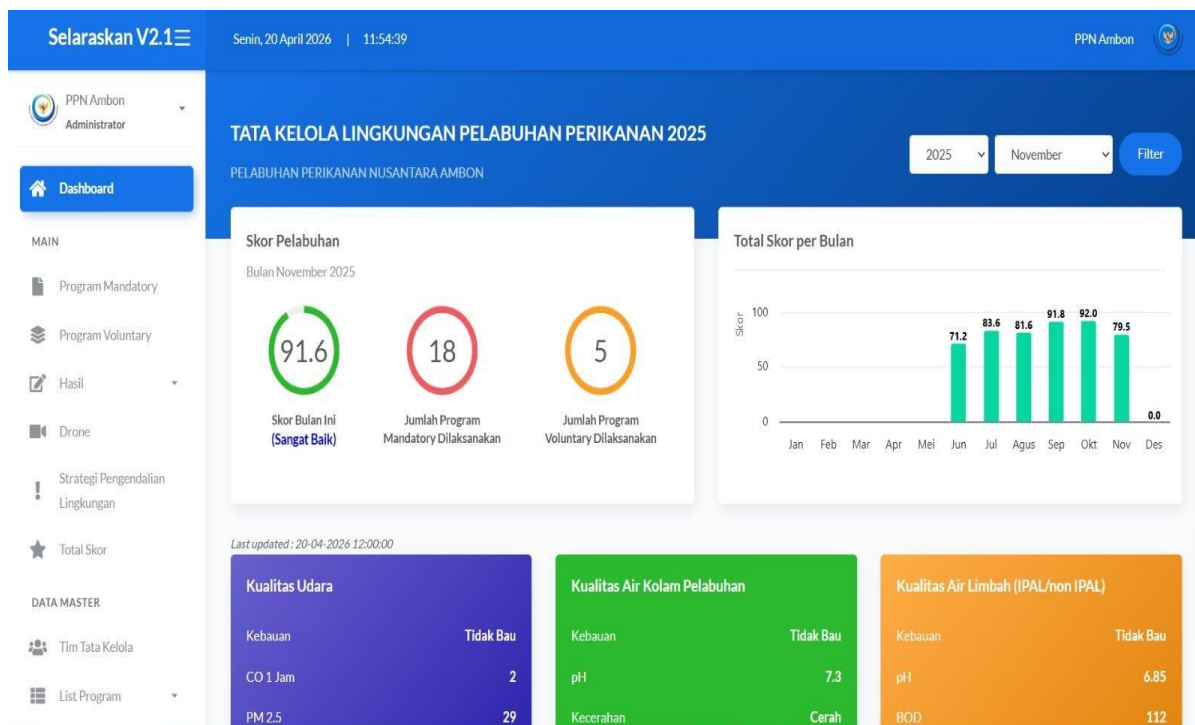
Tabel 38. Data Pengumpulan Sampah dari Kapal

No	Bulan/Tahun	Data Sampah (Kg)	
		Plastik	Non Plastik
1	Januari	24,5	43
2	Februari	70,7	138,3
3	Maret	59	154
4	April	31	75
5	Mei	22	67
6	Juni	49,4	114,6
7	Juli	70	173
8	Agustus	69,9	145,1
9	September	65	121
10	Oktober	114,9	393,1
11	November	76,5	182,5
12	Desember	103	250
Jumlah		679,4	1.674



Gambar 20. Penyerahan Plastik Sampah kepada Nelayan

Kegiatan ini merupakan capaian dari IKU pelabuhan yaitu pada indikator Nilai pengendalian lingkungan di PPN Ambon, di mana terdapat kegiatan yang mendukung nilai tersebut yakni pengelolaan kebersihan yang selalu dilaporkan melalui aplikasi Selaraskan KKP, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 21. Dashboard SELARASKAN KKP

Pada tahun 2025, score nilai pengendalian lingkungan berdasarkan aplikasi SELARASKAN untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tercatat sebesar 83,85 dengan predikat **SANGAT BAIK**, melewati target yang ditetapkan sebesar 30,1. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 39. Hasil Penilaian Selaraskan

NO	NAMA PELABUHAN	2025			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		OKT	NOV	DES			
1	PPN Sibolga	96,16	96,13	96,03	288,31	96,10	SANGAT BAIK
2	PPN Pemangkat	95,36	95,09	95,19	285,64	95,21	SANGAT BAIK
3	PPS Bungus	92,65	93,41	93,41	279,47	93,16	SANGAT BAIK
4	PPN Kejawanan	97,03	89,47	89,47	275,98	91,99	SANGAT BAIK
5	PPS Cilacap	89,01	93,47	93,23	275,71	91,90	SANGAT BAIK
6	PPN Pengambang	93,98	90,89	90,52	275,39	91,80	SANGAT BAIK
7	PPN Palabuhanratu	92,71	88,45	90,89	272,05	90,68	SANGAT BAIK
8	PPN Ternate	91,64	90,11	90,11	271,85	90,62	SANGAT BAIK
9	PPN Prigi	84,80	90,81	90,31	265,92	88,64	SANGAT BAIK
10	PPS Bitung	93,30	85,38	85,09	263,77	87,92	SANGAT BAIK
11	PPP Teluk Batang	93,80	84,66	84,55	263,01	87,67	SANGAT BAIK
12	PPN Brondong	87,33	87,47	87,56	262,36	87,45	SANGAT BAIK

13	PPS Kendari	85,62	85,87	85,95	257,44	85,81	SANGAT BAIK
14	PPN Tanjung Pandan	85,74	83,49	82,98	252,21	84,07	SANGAT BAIK
15	PPN Ambon	90,52	80,52	80,52	251,56	83,85	SANGAT BAIK
16	PPS Nizam Zachman Jakarta	77,41	86,74	87,34	251,48	83,83	SANGAT BAIK
17	PPN Pekalongan	80,75	83,49	83,70	247,94	82,65	SANGAT BAIK
18	PPN Karangantu	81,67	82,19	82,31	246,17	82,06	SANGAT BAIK
19	PPS Belawan	80,86	82,09	82,33	245,28	81,76	SANGAT BAIK
20	PPN Tual	88,34	77,90	77,81	244,05	81,35	SANGAT BAIK
21	PPN Kwandang	89,62	76,85	77,33	243,80	81,27	SANGAT BAIK
22	PPN Sungailiat	90,30	75,01	75,01	240,32	80,11	SANGAT BAIK

PELAKSANAAN KEGIATAN/ PROGRAM



BAB VII. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2025 di PPN Ambon terdiri dari 3 (tiga) program yaitu program pengelolaan kepelabuhanan perikanan, pengelolaan sumber daya ikan dan Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan program pengelolaan perikanan tangkap tersebut diwujudkan melalui serangkaian kegiatan terstruktur yang telah dirancang dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPN Ambon Tahun 2025 dengan nomor SP. DIPA.032.03.2.622461/2024 tanggal 02 Desember 2024. kegiatan ini tidak hanya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga sebagai bagian integral dari dukungan terhadap kebijakan strategis Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) khususnya implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan Kawasan Nelayan Modern Produktif (KNMP), serta penguatan rantai dingin dan infrastruktur pelabuhan perikanan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan di bawah kerangka ekonomi

7.1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Kegiatan Non Fisik)

7.1.1. Program Pengembangan, Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas

Sesuai program kerja PPN Ambon di awal tahun 2025, akan dilaksanakan kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana berupa Rehabilitasi Kantor Administrasi dan Rehabilitasi Bangsal Pengolahan, namun kondisi efisiensi Keuangan Negara hanya dapat dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi fisik sarana prasarana tetap terjaga, terawat dan berfungsi dengan optimal dan atau memperpanjang umur ekonomis fisik sarana prasarana tersebut . Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di tahun 2025 mencakup kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Bertindak, Gedung Kantor Tidak Bertingkat, Pemeliharaan Rumah Negara dan Pemeliharaan Taman Halaman. selain kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ada pula kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin antara lain Pemeliharaan Forklift, Instalasi Air, Listrik dan peralatan lainnya

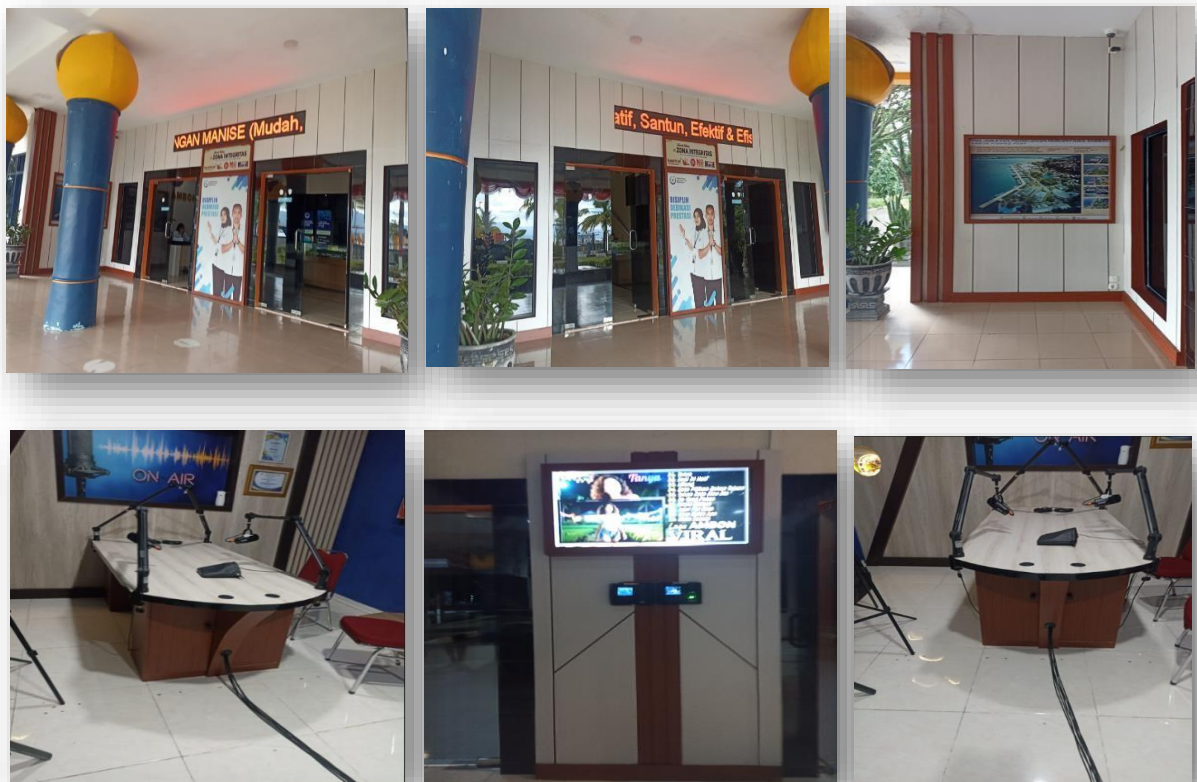
Kegiatan Pemeliharaan ini melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan mematuhi prosedur dan aturan dengan mengutamakan mutu dan kualitas pekerjaan yang terjaga

7.1.1.1. Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat dan Tidak Bertingkat

Kegiatan pemeliharaan gedung kantor bertingkat dan tidak bertingkat di PPN Ambon tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 73/PPK/PPN.A/PL.420/XII/2025 tanggal 03 Desember 2025 oleh pihak penyedia atas nama. CV. Salfahila. Kedua pekerjaan ini dilaksanakan dengan jadwal pelaksanaan selama 14 hari kalender semenjak tanggal 03 s/d 16 Desember 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.485.000. dari kedua kegiatan ini memiliki lingkup pekerjaan yang berbeda antara lain :

1. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Bertingkat

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeliharaan pada ruang kantor utama dan ruang pelayanan dengan item pekerjaan yang meliputi : Perbaikan lantai keramik ruang pelayanan, Interior Lobi, Ruang Podcast dan Booth TV lobi.



2. **Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor tidak Bertingkat**

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeliharaan bangunan Garasi Kendaraan dengan item pekerjaan yaitu perbaikan atap dan pengecatan dinding beton.

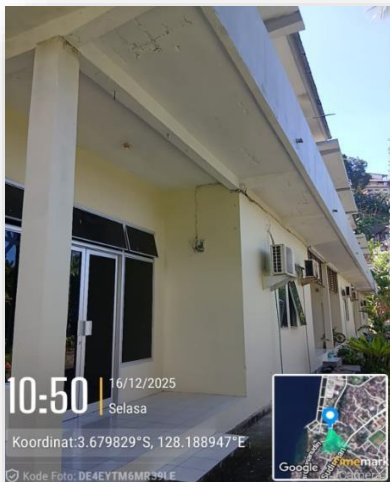


7.1.1.2. **Pemeliharaan Taman Halaman dan Rumah Negara**

Pekerjaan Pekerjaan pemeliharaan taman halaman merupakan suatu kegiatan rutinitas untuk menjaga estetika dan keindahan kawasan perkantoran dengan lingkup pekerjaan meliputi Pengecatan kanstin trotoar / badan jalan dan pengecatan papan nama kantor (Ambon Fishing Port). Sedangkan untuk Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Negara meliputi pengecatan dinding dan beton bangunan rumah Negara (Rumah Dinas). Kegiatan ini dilakukan secara swakelola perorangan dengan nilai Rp. 48.000.000 .



Gambar 24. Pemeliharaan taman dan halaman



7.1.2. Pemeliharaan Fasilitas Peralatan dan Mesin

7.1.2.1. Pemeliharaan Instalasi Listrik

Kegiatan pemeliharaan instalasi listrik di kawasan pelabuhan meliputi penggantian instalasi atau kabel yang telah rusak dengan maksud agar dalam penggunaan serta pengoperasiannya tidak membahayakan petugas maupun pihak lainnya. Selain itu, pemeliharaan ini juga bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan perlengkapan dan fasilitas yang menggunakan daya listrik untuk mendukung pelayanan kepada pengguna jasa. Di samping itu, juga akan memperpanjang masa pakai/penggunaan instalasi listrik supaya bisa bertahan lebih lama.



Gambar 26. Pemeliharaan panel induk listrik dan lampu jalan kawasan kantor

7.1.2.2. Pemeliharaan Instalasi Air

PPN Ambon memiliki fasilitas pelayanan air bersih untuk melayani kebutuhan suplai air bagi kapal perikanan serta pengguna jasa lainnya yang berada dalam kawasan PPN Ambon. Kegiatan pemeliharaan instalasi air bersih yang dilakukan

pada tahun 2025 yaitu perbaikan instalasi pipa di perumahan dinas, pemasangan pipa dari bak induk, serta kegiatan lainnya terkait pelayanan jasa air bersih.



Gambar 27. Perbaikan Pipa Instalasi Air

7.1.2.3. Pemeliharaan Forklift

Seperti halnya peralatan mesin lainnya, bagian mekanik forklift juga cenderung mengalami keausan akibat penggunaan yang dilakukan secara terus menerus. Agar forklift dapat bertahan lama, maka petugas yang menangani forklift di PPN Ambon secara rutin melakukan beberapa perawatan atau pemeliharaan.



7.2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Kegiatan Non Fisik)

7.2.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin merupakan suatu kegiatan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran . pada tahun 2025 PPN Ambon mengadakan pengadaan barang sesuai kebutuhan menunjang operasional perkantoran meliputi :

- 1) **LED TV SMART 60" SAMSUNG 60BU8000** sebanyak 1 unit



- 2) **PC ASUS PG500MV I5/512GB** sebanyak 8 unit



- 3) **Lenovo IDEAPAD 5 2in1 14IRH9** sebanyak 6 unit



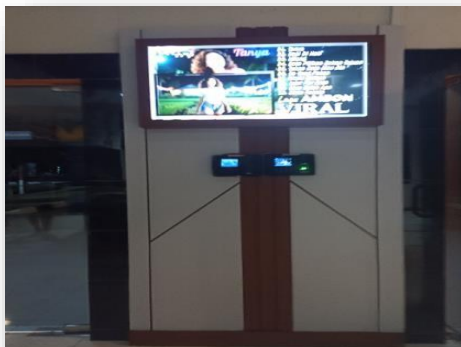
- 4) **Running text display ukuran 32 x 288. (36 x 292 frame) sebanyak 1 unit**



- 5) **TEROPONG BINOCULAR MARINE OCEAN PRO 7x50 CF sebanyak 1 unit**



- 6) **LED TV SMART 43" SAMSUNG 43T6500 sebanyak 2 Unit**



- 7) **AC Split 2 PK 1 Unit**



8) AC Split 1 PK 1 Unit



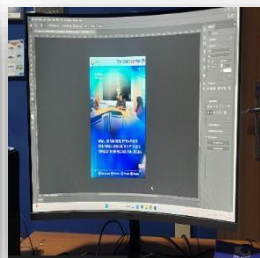
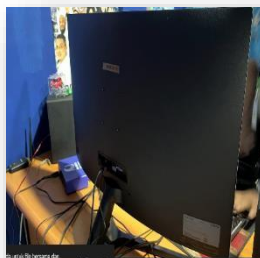
9) Mesin Pompa Air 2 Unit



10) Peralatan Selam Scuba Diving 2 Set



11) Peralatan Podcast



Gambar 39. Pengadaan peralatan podcast

12) Mini PC



13) Timbangan Ikan 100 kg



7.2.2. Pengadaan Kendaraan Dinas

Adapun kegiatan pengadaan kendaraan guna memenuhi standar kebutuhan operasional kantor, selama tahun 2024 antara lain:

- 1) INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) sebanyak 1 unit.



2) Motor Roda 3



7.3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Kegiatan Non Fisik)

7.3.1. Perbaikan Mesin Kapal Perikanan, Perakitan Alat Tangkap, dan Penggunaan GPS/Fish Finder

Kegiatan Training of Trainer (ToT) untuk Champions dalam Perawatan dan Perbaikan Mesin Kapal Perikanan, Perakitan Alat Tangkap, serta Penggunaan GPS/Fish Finder yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi nelayan di wilayah Maluku, khususnya pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemeliharaan mesin kapal guna menjamin efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, serta keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Selain itu, perkembangan teknologi alat bantu penangkapan seperti GPS dan Fish Finder menuntut nelayan untuk memiliki keterampilan yang memadai agar dapat memanfaatkannya secara optimal.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan terkait perawatan dan perbaikan mesin kapal, perakitan alat tangkap, serta penggunaan teknologi navigasi dan pendeteksi ikan. Sasaran kegiatan adalah 30 orang nelayan yang berasal dari berbagai daerah di Maluku dan sekitarnya. Kegiatan dilaksanakan selama empat hari, yaitu pada Selasa, 12 Agustus 2025 sampai dengan Jumat, 15 Agustus 2025, bertempat di Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Pelaksanaan kegiatan menghadirkan

narasumber dari Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang serta didukung oleh tim teknisi dari Yamaha Marine dan Suzuki Marine.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan resmi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang memberikan arahan dan motivasi kepada peserta agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik serta mampu menjadi agen perubahan di daerah masing-masing. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan penyampaian materi teori mengenai perawatan dan perbaikan mesin tempel, teknologi GPS dan Fish Finder, serta pengenalan alat tangkap ikan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif oleh para narasumber guna meningkatkan pemahaman peserta.

Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada praktik perbaikan mesin tempel dengan metode pembongkaran (bedah mesin), dimana peserta secara langsung mempelajari komponen mesin, mengidentifikasi kerusakan, serta melakukan perbaikan pada sistem bahan bakar, kelistrikan, pendingin, dan pelumasan. Kegiatan ini berlangsung secara intensif dan disertai dengan sesi diskusi serta tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi praktik yang diberikan.

Hari ketiga diisi dengan praktik perakitan alat tangkap berupa bubu lipat. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dan melakukan perakitan secara langsung berdasarkan arahan instruktur dari BBPI Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis nelayan dalam membuat alat tangkap yang efektif dan ramah lingkungan. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil perakitan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok.

Pada hari keempat, kegiatan dilanjutkan dengan praktik penggunaan GPS dan Fish Finder di laut menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 27 GT. Peserta mempelajari cara pemasangan alat, pengoperasian, serta pemanfaatannya dalam menentukan lokasi penangkapan ikan secara lebih efektif. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan alat berupa GPS, Fish Finder, dan alat tangkap bubu lipat kepada peserta, khususnya nelayan dari Kota Ambon dan Pulau Seram, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas nelayan.



Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas nelayan baik dari aspek teknis maupun pemanfaatan teknologi. Melalui pendekatan Training of Trainer, diharapkan peserta dapat menjadi pionir yang mampu menerapkan serta menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada nelayan lain di wilayahnya, sehingga mendukung peningkatan kinerja sektor perikanan tangkap secara berkelanjutan.

7.3.2. Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan

Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan dalam mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko pekerjaan nelayan di laut yang bersifat berbahaya, sulit, dan menuntut keterampilan khusus, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi dalam aspek operasional penangkapan ikan, keselamatan kerja, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah selama dua hari, yaitu pada Jumat, 13 Juni 2025 hingga Sabtu, 14 Juni 2025, dan diikuti oleh sebanyak 40 orang nelayan setempat. Pelaksanaan

kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku (Gugus Pulau III Seram Utara), Pemerintah Desa Pasanea, serta instruktur dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan oleh Kepala Desa Pasanea dan Kepala PPN Ambon, serta dilanjutkan dengan penyampaian materi dan praktik.

Materi yang diberikan dalam kegiatan ini mencakup pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan, seperti cara membawa kapal dengan aman, membaca navigasi laut, menentukan posisi kapal, serta pengenalan desain, perakitan, dan perawatan alat tangkap. Selain itu, peserta juga dibekali dengan materi keselamatan kerja meliputi pencegahan kebakaran, penggunaan alat keselamatan, stabilitas kapal, hingga tindakan penyelamatan diri. Metode pembelajaran dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, simulasi, serta praktik lapangan, sehingga peserta dapat memahami materi secara komprehensif.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan tingkat kehadiran mencapai 100%. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan bimtek berjalan dengan baik, baik dari aspek kesiapan panitia, kualitas materi, metode pembelajaran, maupun kemampuan instruktur dalam menyampaikan materi. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian akhir, seluruh peserta dinyatakan lulus dan berhak memperoleh Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) yang diterbitkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.



Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kompetensi dan kesadaran nelayan terhadap pentingnya keselamatan kerja serta profesionalisme dalam menjalankan usaha penangkapan ikan. Diharapkan melalui kegiatan ini, para nelayan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh

dalam aktivitas sehari-hari serta mendukung peningkatan produktivitas dan keselamatan di sektor perikanan tangkap.

7.4. Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025 ini disusun sebagai dokumentasi visual dari rangkaian peristiwa penting yang telah terjadi sepanjang tahun 2025. Melalui rangkaian foto dan narasi singkat, kaleidoskop ini menghadirkan kilas balik perjalanan setahun penuh, sekaligus menjadi refleksi atas upaya dan pencapaian yang telah diraih. Setiap gambar adalah sebuah cerita, dan setiap narasi adalah sebuah catatan sejarah yang menggambarkan semangat kolaborasi, dedikasi, dan inovasi.

Januari 2025

AMBON (2/1) - Mengawali kerja ditahun 2025, Kepala PPN Ambon dan jajarannya berdiskusi dengan para nakhoda kapal perikanan yang sementara bertambat di dermaga, terkait evaluasi aktifitas penangkapan ikan dan penerapan PNBP Pasca Produksi, yang tentunya negara hadir untuk mengatur, menata sektor kelautan dan perikanan untuk pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta memberikan dampak kepada negara dan masyarakat.



AMBON (7/1) – Masih dengan semangat mengawal PNBP Pasca Produksi, Kepala PPN Ambon Jafar Sahubauwa bersama Tim melakukan inspeksi pada kapal-kapal yang menunggu kegiatan bongkar. Sebanyak 9 kapal dengan alat tangkap pancing cumi dan jala jatuh berkapal yang sedang menunggu pembongkaran tersebut dengan estimasi hasil tangkapan sebanyak 130 ton yang terdiri dari jenis cumi dan ikan.

Kapal kapal dimaksud baru kembali dari daerah penangkapan (*fishing ground*) dan karena kondisi gelombang dan cuaca buruk, kapal-kapal tersebut memilih berlindung dan berlabuh di teluk ambon sembari menunggu arahan pemilik kapal untuk dilakukan pembongkaran.



Dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2024 yang digelar oleh KPPN Ambon Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berhasil meraih penghargaan PERINGKAT III pada kategori Satker dengan Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak untuk Periode Semester II Tahun Anggaran 2024. Terima kasih kepada seluruh Tim atas kerja keras dan komitmennya!

Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Februari 2025



AMBON (25/02) - Kepala PPN Ambon Jafar Sahubauwa bersama Tim melakukan inspeksi peninjauan ketersediaan stok ikan dalam mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat selama bulan ramadhan hingga hari raya idul fitri.

Kepala Pelabuhan yang didampingi para Katimja tersebut meninjau beberapa fasilitas *coldstorage* yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, antara lain PT. Intimas Surya, PT. Asmin Jumahir Sejahtera dan lainnya.

Dari data yang diperoleh dari Unit Pengolahan Ikan yang ada, sebanyak 263,35 ton yang masih tersimpan di *coldstorage* dan siap memasok untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di kota ambon. Dari rata-rata kebutuhan pasokan ikan di pasar sebanyak 4 ton per hari, berarti sampai idul fitri nanti masih aman terlayani, tutur Kepala Pelabuhan. Jenis cakalang masih mendominasi dengan total 102 ton, tuna 79,8 ton, tuna, 32,9 ton, deho 28 ton, layang 13,6 ton, kembung 3 ton serta jenis lainnya sebanyak 4,2 ton.

Maret 2025



AMBON (06/03) – Kepala Pelabuhan Jafar Sahubauwa meninjau langsung aktivitas tambat kapal pasca produksi, dengan muatan cumi dan ikan yang baru kembali dari *fishing ground*.

AMBON
(20/03) - Menjelang libur nasional, cuti bersama, dan Hari

Raya Idul Fitri, Kepala PPN Ambon memimpin rapat koordinasi untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan selama masa libur. Dalam rapat ini, dibahas sistem kerja yang akan diterapkan, termasuk penyesuaian jadwal piket (WFA/WFO) dan pengawasan layanan utama agar aktivitas pelabuhan tetap berjalan dengan baik.



April 2025



AMBON (08/04) - Kepala PPN Ambon, Bapak Jafar Sahubauwa, bersama jajaran staf mengikuti kegiatan Halalbihalal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara hybrid. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi di lingkungan KKP pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti

Wahyu Trenggono, berkenan memimpin kegiatan tersebut dan menyampaikan pesan-pesan kebersamaan serta semangat kerja kolektif untuk mewujudkan program prioritas KKP ke depan.

Melalui momen Halalbihalal ini, diharapkan semangat kolaborasi dan kekeluargaan antar pegawai di lingkungan KKP semakin terjaga, termasuk di UPT daerah seperti PPN Ambon, dalam memberikan pelayanan terbaik dan mendukung visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

AMBON (09/04) - Kepala PPN Ambon Jafar Sahubauwa membuka kegiatan Halal Bihalal dan silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 H bersama seluruh pegawai sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar pegawai.



Momen ini juga sekaligus menjadi ajang pelepasan dan penghormatan bagi Bapak Syachlan Sangadji yang telah memasuki masa purna tugas. Terima kasih atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi beliau selama ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani masa pensiun.



AMBON (26/04) – Selama akhir pekan kemarin, Tim Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon bersama enumerator terus menunjukkan dedikasi tinggi. Tanpa mengenal hari libur, pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat ikan tetap berjalan, guna menjamin kelancaran, ketertiban, serta menjaga kualitas hasil perikanan di PPN Ambon.

Mei 2025

AMBON (05/05) – PPN Ambon telah menerbitkan sejumlah SKKP dari beberapa Pelabuhan Perikanan binaan diantaranya PP. Sorong sebanyak 5 sertifikat, PP. Merauke sebanyak 18 sertifikat, dan PP. Fandoi sebanyak 2 sertifikat.

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) merupakan bukti resmi bahwa kapal perikanan telah memenuhi seluruh persyaratan kelaiklautan dan dinyatakan laik untuk beroperasi. SKKP diterbitkan setelah kapal dinyatakan memenuhi tiga aspek utama yaitu laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Kapal yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak akan diberikan izin berlayar, dan apabila ditemukan pelanggaran, petugas berwenang dapat mengambil tindakan tegas seperti penahanan kapal atau pencabutan izin operasional.





AMBON (08/05) - Kepala PPN Ambon, Jafar Sahubauwa, bersama Katimja dan Tim Operasional menerima kunjungan investor asing dari Tiongkok di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Kunjungan ini turut didampingi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama investasi di sektor perikanan. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menjajaki potensi pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi hasil perikanan di wilayah Maluku.

Juni 2025

AMBON (11/06) – Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Jafar Sahubauwa, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Sertifikasi Jarak Jangkau Jauh dan Izin Komunikasi Radio Perikanan yang dilaksanakan di lingkungan PPN Ambon.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan sertifikasi radio bagi operator kapal nelayan, sehingga mendukung keselamatan pelayaran dan kelancaran komunikasi laut. Program pelatihan ini merupakan hasil sinergi antara PPN Ambon dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon.



AMBON (14/06) - Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikat Kecakapan Nelayan ditahun 2025. Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) ini dibuka oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Jafar Sahubauwa.

Turut hadir dalam kegiatan dimaksud Kepala Pemerintahan Negeri Pasanea, Kepala Gugus Pulau III Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Perwakilan Tim Gef 6, serta Para Instruktur SKN. Kegiatan yang diikuti 40 orang peserta nelayan ini berlangsung selama 2 (dua) hari dengan menerima materi teori dan praktik dalam menambah ketrampilan para nelayan dalam aktifitas melaut.

PPN AMBON (16/6) - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak Rachmat Pambudy dan rombongan meninjau fasilitas dan aktifitas pendaratan ikan di PPN Ambon. Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas di Maluku ini dengan salah satu agendanya adalah peninjauan PPN Ambon. Selanjutnya Bapak Menteri dan rombongan melanjutkan peninjauan rencana pembangunan jalan lingkar teluk ambon.



Juli 2025



AMBON (11/07) - Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Jafar Sahubauwa, hadir secara langsung dalam kegiatan Workshop Regional: Strategi Pembiayaan Inovatif untuk Infrastruktur Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Maluku, yang berlangsung pada hari Kamis–Jumat, 10–11 Juli 2025 di Hotel Swiss-Belhotel Ambon.

Workshop ini merupakan bagian dari implementasi Komponen 3 Proyek LAUTRA – Hibah ProBlue World Bank, yang difokuskan pada penyusunan strategi pembiayaan inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pesisir, khususnya di kawasan konservasi perairan.

AMBON (25/07) - Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Jafar Sahubauwa, menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bapak Dr. Nono Sampono, [M.Si](#), di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat nelayan di wilayah Maluku, serta meninjau langsung aktivitas pelabuhan, hasil tangkapan ikan, dan alat tangkap nelayan.



Aspirasi dan masukan dari para nelayan menjadi referensi dalam kunjungan anggota DPD RI Dapil Maluku ini di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.



AMBON (31/07) - Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Jafar Sahubauwa, menghadiri Rapat Evaluasi Percepatan Ekspor Maluku Semester I Tahun 2025 yang digelar di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Maluku.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Percepatan Ekspor, dan turut dihadiri oleh instansi lintas sektor serta pelaku usaha ekspor.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala PPN Ambon menegaskan pentingnya dukungan lintas instansi dalam mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha, serta mendorong penyederhanaan layanan dokumen kapal nelayan kecil khususnya terkait penerbitan dokumen SHTI yang menjadi syarat utama ekspor komoditas tuna ke Uni Eropa.

Agustus 2025

AMBON (12/08) – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon bersama GEF 6 CFI Indonesia menggelar kegiatan Training of Trainers (TOT) Champion Nelayan.

Kegiatan TOT diikuti kurang lebih 30 peserta nelayan kecil dari perwakilan sentra nelayan ini dengan materi kegiatan meliputi perbaikan mesin kapal perikanan, perakitan alat tangkap, dan penggunaan dan pengoperasian GPS.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bapak Erawan Asikin, yang sebelumnya diawali sambutan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan PMU GEF 6 CFI Indonesia.

Dalam pengantarnya, Kepala Pelabuhan menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh peserta yang merupakan calon trainer/pelatih yang dapat menjadi model di daerahnya dalam menularkan ilmu dan ketrampilannya yang didapat dalam kegiatan ini.



Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dalam arahannya mengharapkan adanya update aturan dari para nelayan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dilapangan, khususnya dalam operasional, perijinan dan penempatan rumpon.

Pada kesempatan yang sama, selaku narasumber dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan DJPT, yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan, Ibu Lingga Prawitaningrum, menegaskan bahwa TOT ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membekali nelayan dengan keterampilan teknis yang dapat meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja di laut.

Pada sesi pembukaan, juga dilakukan Penyerahan buku pelaut dan seminar kit secara simbolis bagi nelayan atau awak kapal perikanan. Pelatihan yang berlangsung selama empat hari ini meliputi materi teori dan praktik atau simulasi.



AMBON (17/08) – Diguyur hujan dipagi hari, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala PPN Ambon, Jafar Sahubauwa, selaku pembina upacara.

Dalam kesempatan tersebut, beliau membacakan amanat Menteri Kelautan dan Perikanan, sekaligus menyematkan tanda Satyalancana Karya Satya kepada pegawai serta memberikan apresiasi kepada pegawai dengan kinerja terbaik di PPN Ambon.

Upacara diikuti oleh pegawai PPN Ambon, satuan kerja BBP3KP Ambon, DWP PPN Ambon, mahasiswa PKL, serta nelayan PPN Ambon.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai acara kebersamaan, diantaranya lomba duet, pembagian hadiah lomba semarak 17-an, doorprize, serta ramah tamah keluarga besar PPN Ambon.

Semoga peringatan HUT RI ke-80 ini membawa semangat baru dalam meningkatkan pelayanan, memperkuat persatuan, dan mewujudkan Indonesia yang semakin Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

September 2025

AMBON (10/09) - Kepala PPN Ambon, Jafar Sahubauwa, berkesempatan memberikan arahan pada kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (SJJJ) dan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) kepada para nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama PPN Ambon dengan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi awak kapal nelayan tentang penggunaan perangkat radio dan tata cara berkomunikasi yang baik diatas kapal.

Berlokasi di ruang rapat PPN Ambon, kegiatan ini diikuti oleh para operator radio kapal nelayan dan dihadiri oleh para narasumber dari Loka Monitor SFR Ambon dan Distrik Navigasi kelas I Ambon.

Bimbingan teknis yang diisi oleh para narasumber dan instruktur ini meliputi materi teori pengetahuan perangkat, regulasi, hingga praktik tata cara berkomunikasi.

Pada sesi kegiatan, Kepala Loka Monitor SFR Ambon menyerahkan sejumlah sertifikat kepada Kepala PPN Ambon, yang selanjutnya diserahkan langsung secara simbolis kepada beberapa awak kapal yang sedang bertambat di dermaga PPN Ambon. Penyerahan ini menjadi simbol dukungan nyata terhadap upaya peningkatan keselamatan dan kelancaran aktivitas melaut melalui pemanfaatan teknologi komunikasi.

Dalam kesempatan tersebut, Jafar Sahubauwa juga menegaskan pentingnya keberadaan operator radio yang tersertifikasi. Menurutnya, komunikasi yang efektif di laut akan memperkuat koordinasi, komunikasi antar kapal maupun dengan stasiun radio pantai dalam menjaga keselamatan pelayaran, sekaligus meningkatkan jejaring antar kapal di wilayah perairan Maluku.

Melalui kegiatan ini, nelayan diharapkan semakin siap menghadapi tantangan operasional di lapangan serta mampu mengoptimalkan fungsi komunikasi radio sebagai sarana penghubung utama saat berlayar.





AMBON (30/09) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sekaligus pelantikan jabatan fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 secara serentak.

Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, beberapa pegawai turut dilantik dalam prosesi yang disaksikan langsung oleh Kepala PPN Ambon beserta jajaran. Semoga para pegawai yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan profesional, berdedikasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor perikanan.

Oktober 2025

AMBON (22/10) - Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Bapak Jafar Sahubawa, menerima kunjungan Tim Japan International Cooperation Agency (JICA) di PPN Ambon.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan penyusunan Kebijakan JICA untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku.

Dalam kunjungannya yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bapak Erawan Asikin, Tim JICA berkesempatan meninjau secara langsung kegiatan pembongkaran ikan tuna di dermaga PPN Ambon, serta mengunjungi salah satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) di kawasan pelabuhan, yakni PT Harta Samudra.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah timur Indonesia.





AMBON (30/10) - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Bapak Ramli Makawaru, menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik: Evaluasi Standar Pelayanan SLO dan HPK-D Kapal Perikanan serta Sosialisasi Pencegahan Konflik Kepentingan pada Instansi Pemerintah.

Kegiatan ini menghadirkan Ombudsman Republik Indonesia sebagai narasumber dan diikuti oleh perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berbagai stakeholder sektor perikanan.

Forum ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan HPK-D Kapal Perikanan, serta memperkuat pemahaman aparaturnya mengenai pentingnya pencegahan konflik kepentingan di lingkungan instansi pemerintah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha perikanan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang profesional, bersih, dan berintegritas di bidang kelautan dan perikanan.

November 2025

AMBON (18/11) - Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Jafar Sahubauwa didampingi Kasubag Umum dan Para Katimja menghadiri Webinar DWP DJPT yang dilaksanakan oleh DWP PPN Ambon.

Pelaksanaan Webinar yang dilaksanakan oleh DWP PPN Ambon selaku tuan rumah ini, dengan tema "Wujudkan perempuan tangguh melalui peningkatan ketrampilan dan kreatifitas".



Pelaksanaan Webinar ini diawali dengan laporan Ketua DWP PPN Ambon Ibu Randasuli Jafar yang selanjutnya arahan dan sambutan Ketua DWP DJPT Ibu Evi Lotharia Latif, SH, sekaligus membuka kegiatan webinar.

Hadir secara daring pada kegiatan webinar ini, para Ketua DWP Eselon II DJPT, para Ketua DWP UPT DJPT se Indonesia serta para undangan.

Adapun webinar ini diisi oleh narasumber dari anggota DWP PPN Ambon meliputi tayangan materi proses pengolahan ikan asap cair, dan sambal asap, serta simulasi atau praktek pembuatannya.

Pelaksanaan Webinar ini diapresiasi oleh Kepala Pelabuhan, karena DWP PPN Ambon sudah dapat menampilkan capaian keberhasilannya berupa pembentukan hingga operasional UMKM.



AMBON (17/11) - Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Bapak Ramli Makkawaru menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Jarak Jauh dan Izin Komunikasi Radio Perikanan. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan awak kapal perikanan tentang keselamatan di laut.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Loka Monitor Spektrum Radio Ambon ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para nelayan dalam penggunaan radio komunikasi dan pemahaman terkait komunikasi jarak jauh. Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat aspek keselamatan pelayaran, mendukung kelancaran operasional di laut, serta meningkatkan kapasitas nelayan Indonesia dalam pemanfaatan perangkat komunikasi sesuai standar.

Desember 2025

PPN AMBON (16/12) - Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Jafar Sahubauwa, menghadiri pertemuan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) se-Maluku.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath yang didampingi Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku, Erawan Asikin, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Adapun perwakilan UPT KKP se-Maluku dihadiri langsung oleh pimpinan dan perwakilan.



Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan pengelolaan perikanan Provinsi Maluku ke depan, dengan fokus pada penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan ekonomi daerah di Provinsi Maluku.



AMBON (17/12) - Dalam rangka sinkronisasi kesesuaian pemanfaatan ruang, hari ini Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Bapak Jafar Sahubauwa, didampingi Kasubag Umum dan Katimja TKPU serta pegawai terkait melakukan Koordinasi ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

Dalam kunjungan ini, Kepala Pelabuhan bersama Tim disambut Sekretaris Dinas dan berdiskusi tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan PPN Ambon yang saat ini sedang berproses penerbitan dokumen KKPRL dan KKPRD.

Koordinasi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan tata lingkungan dengan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah. Kegiatan ini membahas kondisi eksisting lingkungan, potensi dan permasalahan yang ada, serta keterpaduan KBLI, AMDALNET dan RDTR dengan dokumen perencanaan lainnya. Melalui koordinasi ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemahaman yang dapat menjadi acuan yang efektif dalam pengelolaan lingkungan dan mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku.

AMBON (29/12) – Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Jafar Sahubauwa menggelar rapat evaluasi kinerja dan penguatan koordinasi internal memasuki akhir tahun anggaran 2025 dan memasuki tahun anggaran 2026.

Rapat ini membahas sejumlah agenda penting, di antaranya evaluasi perkembangan capaian kinerja, kehadiran pegawai melalui sistem absensi Work From



Anywhere (WFA) dan Work From Office (WFO), serta keaktifan pegawai dalam mengawal arahan pimpinan.

Dalam rapat tersebut, Kepala PPN Ambon juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para petugas lapangan yang telah bekerja maksimal dalam melakukan percepatan pelaksanaan tugas hingga terealisasinya pembayaran LPS. Selain itu, seluruh pegawai diingatkan untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan didukung dengan administrasi yang lengkap sebagai bentuk akuntabilitas dan tertib pengelolaan kinerja.

Kepala PPN Ambon juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh pegawai dalam mendukung publikasi dan pemberitaan kegiatan positif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Banyak kegiatan positif KKP yang belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat menjadi perhatian bersama, sehingga seluruh pegawai diajak untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi dan kegiatan positif KKP secara bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, rapat turut membahas penguatan metode dan alur pelaporan kegiatan, dengan penekanan pada kejelasan output agar setiap hasil kegiatan dapat mudah diidentifikasi dan terdokumentasi dengan baik. Rapat ditutup dengan penyampaian ucapan Selamat Natal kepada pegawai yang merayakan serta harapan agar seluruh jajaran PPN Ambon tetap menjaga semangat kebersamaan dan profesionalisme dalam menyambut tahun baru dan pelaksanaan program kerja ke depan.

PERMASALAHAN TINDAK LANJUT



BAB VIII. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan program pengelolaan perikanan tangkap yang mencakup berbagai kegiatan yang diimplementasikan sepanjang tahun 2025. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut, ditemukan beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi, baik dari segi operasional, teknis, maupun non-teknis. Permasalahan yang muncul ini memerlukan pendekatan solutif yang tepat dan terukur agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam operasional beserta upaya pemecahannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

8.1. Tim Kerja Operasional Pelabuhan

- **Permasalahan:**

1. Kurangnya data dan informasi kegiatan dari masing-masing Tim Kerja.
2. Keterbatasan informasi tentang kegiatan operasional pelabuhan.
3. Kesulitan dalam mengakses data dan informasi kegiatan.

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan koordinasi dengan masing-masing ketua Tim kerja untuk setiap kegiatan dapat didokumentasikan dan dinarasikan.
2. Membuat sistem pengumpulan data dan informasi kegiatan yang terstruktur dan terintegrasi.
3. Menunjuk petugas yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi kegiatan.
4. Membuat laporan kegiatan operasional pelabuhan secara berkala.
5. Membuat publikasi tentang kegiatan operasional pelabuhan melalui media sosial dan website PIPP.

8.2. Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

- **Permasalahan:**

1. Keterbatasan lahan industri.
2. Perawatan fasilitas yang kurang memadai.
3. Kurangnya promosi dan publikasi tentang layanan usaha di pelabuhan.

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan evaluasi tentang penggunaan lahan industri yang ada.
2. Membuat rencana pengembangan lahan industri untuk meningkatkan kapasitas.

3. Melakukan perawatan fasilitas secara berkala untuk memastikan kualitas dan keselamatan.
4. Membuat prosedur perawatan fasilitas yang terstruktur dan terintegrasi.
5. Membuat pelatihan untuk petugas tentang perawatan fasilitas yang benar.
6. Membuat promosi dan publikasi tentang layanan usaha di pelabuhan melalui media sosial dan website PIPP.

8.3. Tim Kerja Kesyahbandaran

- **Permasalahan:**

1. Kurangnya pengetahuan nahkoda maupun pemilik kapal dalam menggunakan aplikasi e-PIT.
2. Adanya permohonan pembatalan SHTI-LTS yang telah diterbitkan untuk dialihkan ke Certificate of Admissibility (CoA)
3. Peralihan aplikasi Logbook Penangkapan Ikan dari versi 2.0 ke versi 3.0 memerlukan ruang penyimpanan yang besar.

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan konsultasi dengan operator dari pelabuhan lain dan admin pengelola aplikasi.
2. Melakukan pendampingan bagi nahkoda dan pemilik kapal dalam penginputan aplikasi e-PIT.
3. Melakukan konsultasi dengan admin terkait pembatalan SHTI-LTS dan melakukan pengajuan penerbitan dokumen CoA
4. Memberikan pengarahan dan penjelasan terkait penerbitan dokumen CoA.
5. Menyarankan penggunaan gawai dengan kapasitas penyimpanan yang memadai bagi logbook versi 3.0.

8.4. Dukungan Manajerial

- **Permasalahan:**

1. Selisih kompetensi yang besar antara pegawai dan target kompetensi di Standar Kompetensi Jabatan.
2. Kekurangan target kompetensi yang akan dicapai karena selisih kompetensi tersebut.
3. Kemungkinan adanya kesenjangan antara kemampuan pegawai dan tuntutan pekerjaan.

4. Terdapat pagu blokir AA yang mana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tidak dibuka.

▪ **Tindak Lanjut:**

1. Evaluasi Kompetensi: Melakukan evaluasi kompetensi pegawai untuk mengetahui kemampuan dan kekurangan mereka.
2. Pembuatan Rencana Pengembangan: Membuat rencana pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka.
3. Pelatihan dan Pengembangan: Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Memantau dan mengevaluasi kemajuan pegawai dalam mencapai target kompetensi.
5. Revisi Standar Kompetensi Jabatan: Merevisi Standar Kompetensi Jabatan jika diperlukan untuk memastikan bahwa target kompetensi yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai.
6. Tetap menjalankan kegiatan prioritas sesuai target walaupun anggaran diblokir.
7. Mencari alternatif sumber anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk mencapai target kegiatan.

PENUTUP



BAB IX. PENUTUP

Laporan Tahunan 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja Pelabuhan Perikanan Ambon selama satu tahun terakhir. Laporan ini mencerminkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 telah terlaksana dengan baik, sebagaimana terlihat dari pencapaian kinerja yang berhasil diraih, baik dalam hal kualitas pelayanan publik, akuntabilitas anggaran, kinerja operasional, maupun pemenuhan target kinerja yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja.

Pencapaian tersebut diraih meskipun dihadapkan pada tantangan, seperti *refocusing* atau pemotongan anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, serta keterbatasan pembiayaan untuk pemeliharaan fasilitas. Namun, dibalik keberhasilan yang dicapai, terdapat target yang belum terpenuhi, yakni PNBK dari Sumber Daya Alam (SDA) pasca produksi yang masih di bawah target. Selain itu, pencapaian operasional yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya meliputi berkurangnya jumlah kapal yang berpangkalan, penurunan volume penyaluran es ke kapal perikanan, serta penurunan penyerapan tenaga kerja.

Hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan terobosan dan strategi yang tepat sebagai solusi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan komitmen yang kuat, inovasi, serta sinergi yang lebih erat dengan para pemangku kepentingan agar target yang belum tercapai dapat direalisasikan dan kinerja operasional yang lebih baik lagi.

Disadari bahwa pencapaian yang telah diraih tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan PPN Ambon. Dukungan serta kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mendukung kegiatan prioritas DJPT yaitu PIT dan TCG termasuk juga dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana perluasan areal PPN Ambon. Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah, nelayan, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat umum dalam memahami peran dan kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon bagi pembangunan sektor perikanan dan ekonomi di daerah ini.



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON

Jl. Sultan Hassanuddin, Pandan Kasturi - Ambon

Telp. (0911) 355222, 354728 Fax. (0911) 345291

email : ppnambon@gmail.com